

NOTA DINAS
No. 24/ND/XIX.TJS/1/2025

Kepada Yth. : Tortama KN VI
Dari : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara
Hal : Penyampaian Data Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Lampiran : Satu berkas
Tempat,Tanggal : Tarakan, 24 Januari 2025

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 289/K/X-XIII.2/6/2016 tentang Pedoman Manajemen Kinerja dan Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Ditama Renvaja Nomor 624/ND/XII/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Informasi Pengumpulan Data Capaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Data Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Tahun 2024 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ttd

Hery Purwanto
NIP 197104071996031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Ditama Renvaja;
2. Kepala Direktorat PSMK;
3. Inspektorat PIMK.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.bpk.go.id>





Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia



LAPORAN REVIU PENCAPAIAN KINERJA

TAHUN 2024



BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- 📍 Jalan Mulawarman Nomor 98, Kota Tarakan - Kalimantan Utara
- 📞 (0551) 33939
- ✉️ humastu.kaltara@bpk.go.id
- 🌐 www.kaltara.bpk.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Auditorat Keuangan Negara VI

Tahun 2024

INDEPENDENSI – INTEGRITAS – PROFESIONALISME

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 secara tepat waktu. Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara atas pelaksanaan kinerja pada Tahun Anggaran 2024, yang penyusunannya didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-III.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

LAKIN (Laporan Kinerja) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah laporan kegiatan tugas dan fungsi unit kerja tingkat Eselon II di BPK yang meliputi kegiatan teknis dan kesekretariatan. Kegiatan teknis dilaksanakan oleh Subauditorat dan kegiatan kesekretariatan dilaksanakan oleh Sekretariat Perwakilan. Laporan ini disusun berdasarkan program kegiatan Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dan Rencana Aksi Tahun 2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Kami mengharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk mencapai hasil yang lebih baik pada tahun mendatang. Akhirnya segala masukan, kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada periode Renstra yang akan datang.

Tarakan, 28 Januari 2025

Kepala Perwakilan

Hery Purwanto

NIP 197104071996031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.....	2
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.....	4
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	6
1. Sumber Daya Manusia	6
2. Sumber Daya Keuangan.....	10
E. Isu Strategis.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	19
B. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.....	24
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Hasil Evaluasi AKIP	32
B. Capaian Kinerja.....	32
C. Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Skor Indikator Kinerja BPK Kaltara	37
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	74
E. Perubahan Budaya Kerja	75
F. Realisasi Anggaran	77
G. Inovasi.....	79
H. Penghargaan	80
BAB IV PENUTUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persebaran SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan	7
Tabel 2. Persebaran SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Tabel 3. Persebaran SDM Berdasarkan Rentang Usia.....	9
Tabel 4. Persebaran SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan	9
Tabel 5. Persebaran SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan	9
Tabel 6. Rincian Anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)	10
Tabel 7. Rincian Anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP).....	11
Tabel 8. Pencapaian Indikator Kinerja BPK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	33
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir	38
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 Terhadap Target Jangka Menengah	40
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir	42
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 Terhadap Target Jangka Menengah	43
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir	44
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Terhadap Target Jangka Menengah	45
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	46
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 Terhadap Target Jangka Menengah	48
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir	49
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 Terhadap Target Jangka Menengah	50
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir	50
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 Terhadap Target Jangka Menengah	52
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir	53
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dalam Renstra BPK 2020-2024	54
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir	56
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Terhadap Target Jangka Menengah	56
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir	58
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 Terhadap Renstra 2020-2024	61
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir....	62
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 Terhadap Renstra 2020-2024	65
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir....	66
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 Terhadap Target Jangka Menengah	67
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 dengan Capaian LimaTahun Terakhir....	68
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 Terhadap Target Jangka Menengah	68
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir....	70
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 dalam Renstra 2020-2024	73
Tabel 35. Anggaran dan Realisasi RKP Tahun 2024	77
Tabel 36. Anggaran dan Realisasi RKSP Tahun 2024	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	4
Gambar 2. SDM Kelompok Jabatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	8
Gambar 3. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	13
Gambar 4. Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	13
Gambar 5. Rumah Dinas Jabatan Kepala Perwakilan	14
Gambar 6. Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	15
Gambar 7. Kendaraan Operasional Roda 2 dan 4	16
Gambar 8. Lift dan Mesin Pompa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	16
Gambar 9. Genset dan Traffo BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	17
Gambar 10. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020–2024.....	23
Gambar 11. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024	23
Gambar 12. Perbandingan Skor Kinerja BPK Kaltara Tahun 2022 s.d 2024.....	32
Gambar 13. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir..	54
Gambar 14. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir..	57
Gambar 15. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir..	60
Gambar 16. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	84
Lampiran 2. Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024	86
Lampiran 3. Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	87
Lampiran 4. Alokasi Anggaran Pada BPK Perwakilan Kalimantan Utara Tahun 2024	88
Lampiran 5. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024.....	89
Lampiran 6. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja 2024.....	90
Lampiran 7. Anggaran Dan Realisasi Tahun 2024.....	92
Lampiran 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Lima Tahun Terakhir	93
Lampiran 9. Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2024	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, pemerintahan yang kapabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui Perpres tersebut, setiap instansi pemerintah, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diwajibkan untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sebagai bagian dari SAKIP, setiap instansi pemerintah, termasuk BPK, wajib untuk menyusun Laporan Kinerja. Pelaporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja tidak hanya melekat pada BPK sebagai lembaga, tapi juga wajib disusun oleh kepala satuan kerja yang ada di BPK termasuk Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka diperlukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021. Sementara itu, untuk penerapan di lingkungan internal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dengan Keputusan Sekjen BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada unit-unit kerja Pelaksana BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu satuan kerja pada Auditorat Keuangan Negara VI yang mengelola anggaran. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 merupakan cerminan dari prestasi kerja yang telah dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Menginformasikan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara periode Triwulan IV Tahun 2024;
- d. Menginformasikan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara periode Triwulan IV Tahun 2024; dan
- e. Memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada masa mendatang.

B. Tugas Dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan pada Bagian Kesembilan Pasal 635 ayat (1) menyatakan "BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara merupakan satuan kerja yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI".

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditor Utama Investigasi.

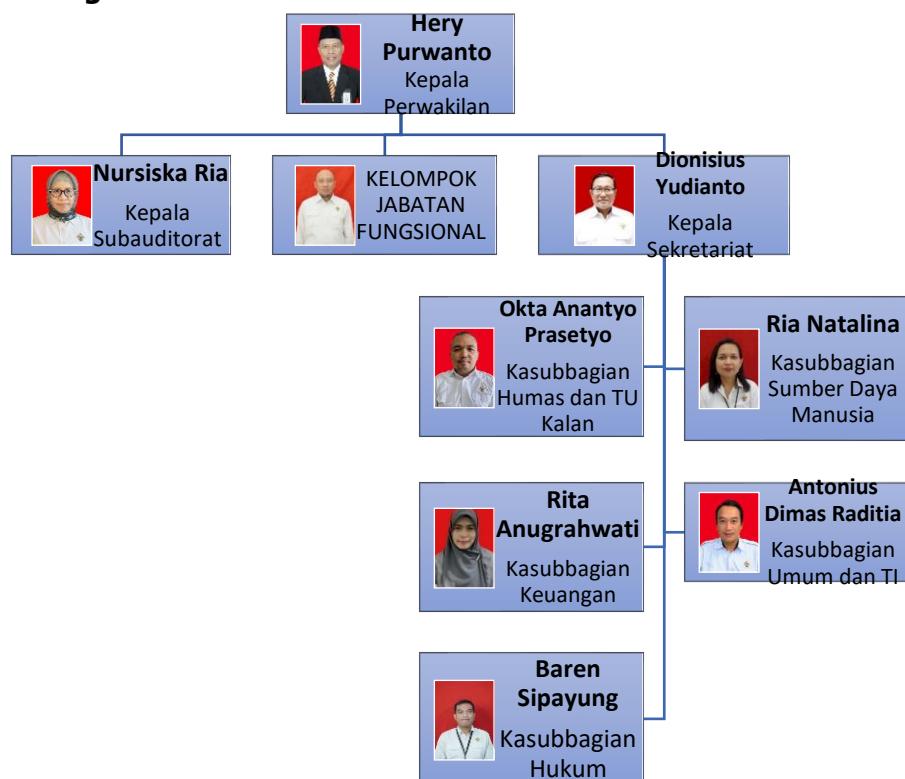
Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

- keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
 5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
 6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
 7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
 8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
 9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
 13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
 15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditor Utama Investigasi;

16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, yang terakhir diubah dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah unsur pelaksana, sebagian tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari:

1. Subauditorat Kalimantan Utara

Subauditorat Kalimantan Utara mempunyai tugas, yaitu:

- a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) Merumuskan rencana kegiatan;
- 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan apparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
- 12) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

2. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;

- e. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- f. Penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Sekretariat Perwakilan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, yang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia, yang bertugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Subbagian Keuangan, yang bertugas melaksanakan kebijakan anggaran, perpendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, yang bertugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- e. Subbagian Hukum, yang bertugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang terdapat pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan bezzeting pegawai periode bulan Desember 2024 berjumlah 89 orang yang terdiri dari 65 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 24 Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Berikut ini disajikan jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan, Kelompok Jabatan, Jenis Kelamin, dan Usia.

a. Berdasarkan Kelompok Jabatan

Tabel 1. Persebaran SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1	Pimpinan Perwakilan	1	-	-	1
2	Subauditorat	-	1	-	1
3	Sekretariat Perwakilan	-	1	-	1
	a. Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan	-	-	1	1
	b. Subbagian Sumber Daya Manusia	-	-	1	1
	c. Subbagian Keuangan	-	-	1	1
	d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	-	-	1	1
	e. Subbagian Hukum	-	-	1	1
Jumlah A (1+2+3)		1	2	5	8
4	Jabatan Fungsional Pemeriksa				
	a. Pemeriksa Utama			-	
	b. Pemeriksa Madya			1	
	c. Pemeriksa Muda			4	
	d. Pemeriksa Pertama			39	
5	Jabatan Fungsional Lainnya			3	
6	Jabatan Pelaksana				
	a. Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan			1	
	b. Subbagian Sumber Daya Manusia			1	
	c. Subbagian Keuangan			4	
	d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi			3	
	e. Subbagian Hukum			1	
Jumlah B (4+5+6)				65	
	PTT (C)			24	
Jumlah Pegawai (A+B+C)				89	



Gambar 2. SDM Kelompok Jabatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

b. Persebaran Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. Persebaran SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pimpinan Perwakilan	1	0	1
2	Subauditatorat Kaltara	21	24	45
3	Sekretariat Perwakilan			
	a. Kepala Sekretariat	1	0	1
	b. Subbagian Humas dan Tatas Usaha Kepala Perwakilan	3	0	3
	c. Subbagian Sumber Daya Manusia	1	1	2
	d. Subbagian Keuangan	3	2	5
	e. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	6	0	6
	f. Subbagian Hukum	2	0	2
4	PTT	20	4	24
	Sub Jumlah	58	31	
	Jumlah	89		89

c. Persebaran Berdasarkan Rentang Usia

Tabel 3. Persebaran SDM Berdasarkan Rentang Usia

No		Unit Kerja	Rentang Usia							Jumlah
			< 26 Tahun	26-30 Tahun	31-40 Tahun	41-50 Tahun	51-55 Tahun	>55 Tahun		
1		Pimpinan Perwakilan	-	-	-	1	-	-	-	1
2		Subauditorat Kaltara	3	20	17	5	-	-	-	45
3		Sekretariat Perwakilan								
	a	Kepala Sekretariat	-	-	-		1			1
	b	Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan	-	1	-	1	-	-	-	2
	c	Subbagian Sumber Daya Manusia	1	-	1	1	-	-	-	3
	d	Subbagian Keuangan	4	-	-	1	-	-	-	5
	e	Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	3	1	-	1	1	-	-	6
	f	Subbagian Hukum	-	1	1	-	-	-	-	2
4		PTT	3	5	13	1	1	1	24	
		Sub Jumlah	14	30	35	10	3	1		
		Jumlah				89				89

d. Persebaran Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 4. Persebaran SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan									Jumlah
		SLTP	SMA/SMK	D-2	D-3	D-IV	S-1	S-2	S-3		
1	PNS		1		8		44	12			65
2	PTT		18				6				24
	Sub Jumlah	0	19	0	8	0	51	11	0		
	Jumlah				89						89

e. Persebaran Berdasarkan Pangkat/golongan

Tabel 5. Persebaran SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Unit Kerja	Gol. I	Gol II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Pimpinan Perwakilan	0	0	0	1	1
2	Subauditorat	0	0	41	4	45
3	Sekretariat					

No	Unit Kerja	Gol. I	Gol II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
	a. Kepala Sekretariat	0	0	0	1	1
	b. Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala	0	0	1	1	2
	c. Subbagian Sumber Daya Manusia	0	1	2	0	3
	d. Subbagian Keuangan	0	4	1	0	5
	e. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	0	2	4	0	6
	f. Subbagian Hukum	0	1	1	0	2
4	PTT					24
Jumlah						89

2. Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka untuk mewujudkan Target Kinerja Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada awalnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp18.833.651.000,00. Alokasi anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp18.894.486.000,00. Rincian anggaran untuk mewujudkan Target Kinerja Tahun 2024 disajikan di dalam **Lampiran 1.** yang terdiri dari anggaran untuk kegiatan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sejumlah Rp 6.714.489.000,00 dengan target 120 volume keluaran dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sejumlah Rp12.179.997.000,00 dengan target 52 volume keluaran. Adapun rincian anggaran RKP dan RKSP tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Rincian Anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
1	1043.FAF.U41	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	5.132.279.000	12 LHP
	a.	<i>LHP Keuangan</i>	2.680.242.000	6 LHP
	b.	<i>LHP Kinerja</i>	1.467.726.000	4 LHP Kinerja
	c.	<i>LHP DTT</i>	984.311.000	2 LHP DTT
2	1043.FAF.051	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	133.866.000	63 LHP
3	1043.FAF.116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	98.064.000	12 Laporan
4	1043.FAF.124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	146.608.000	12 Laporan
5	1043.FAF.083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1.960.000	1 Rumusan
6	1043.FAF.174	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	1.073.233.000	12 Laporan

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
	A.	Melaksanakan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan	7.460.000	
	B.	Melaksanakan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan	992.825.000	
	C.	Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	65.763.000	
	D.	Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan	7.185.000	
7	1043.FAF.091	Sumbangan IHPS Perwakilan	125.148.000	2 Laporan Sumbangan IHPS
8	1043.FAF.099	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3.331.000	6 Laporan
Jumlah (1 s.d. 8)			6.714.489.000	120

Tabel 7. Rincian Anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP)

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
1	1043.FAF.175	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.882.506.000	21 Laporan
	051.	Melaksanakan Layanan Tata Usaha	145.338.000	
	052.	Melaksanakan Layanan Kehumasan	310.492.000	
	053.	Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia	259.692.000	
	054.	Melaksanakan Layanan Keuangan	363.225.000	
	055.	Melaksanakan Layanan Umum dan TI	430.559.000	
	056.	Melaksanakan Layanan Hukum	214.840.000	
	057.	Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK	40.304.000	
	058.	Melaksanakan Layanan Manajemen Internal	118.056.000	
2	1043.EBA.994	Layanan Perkantoran	9.444.172.000	1 Layanan
	EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	4.338.834.000	
	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.105.338.000	
	a.	Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan	755.782.000	
	b.	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	38.400.000	
	c.	Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	197.612.000	
	d.	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	105.120.000	

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
	e.	Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	3.742.182.000	
	f.	Layanan Dukungan Kesekretariatan Perwakilan	266.242.000	
3	CI.1043.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	853.319.000	
	EBB.951.052	Layanan Sarana Internal	497.854.000	28 Unit
	EBB.971.051	Layanan Prasarana Internal	355.465.000	2 Paket
		Jumlah (1 s.d. 3)	12.179.997.000	52

1. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana berikut.

a. Tanah dan Bangunan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

1) Tanah

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memiliki dua bidang tanah seluas 13.279 m² yang terletak pada dua lokasi yaitu:

- a) Seluas 6.000 m² di Jl. Mulawarman No.98, Karang Anyar, Kota Tarakan Kalimantan Utara diperoleh pada Tahun 2016 digunakan untuk Mess Pegawai BPK (Bangunan Gedung Kantor, Auditorium, Mushola, Gudang dan Kantin).

2) Bangunan

a) Gedung Kantor

Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terletak di Jl. Mulawarman No.98, Karang Anyar, Kota Tarakan Kalimantan Utara, mulai ditempati pada Tahun 2019, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memiliki empat lantai, dengan luas bangunan masing-masing lantai yaitu:

- 1) Lantai pertama seluas 917 m²;
- 2) Lantai kedua seluas 917 m²;
- 3) Lantai ketiga seluas 917 m².
- 4) Lantai keempat seluas 917 m².



Gambar 3. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

b) Mess Pegawai

Dalam memenuhi kebutuhan prasarana pegawai dan pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, pada Tahun 2020 dibangun Mess 3 lantai, dengan luas masing-masing lantai kurang lebih 876 m². Fasilitas Mess terdiri atas 42 kamar tidur yang dilengkapi dengan toilet pada masing- masing kamar, dapur, dan lobby, 3 aula, 1 mushala, dan 1 ruang pengelola.



Gambar 4. Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

c) Rumah Dinas Jabatan Kepala Perwakilan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, pada tahun 2017 dilakukan kontrak kerja sama dalam hal sewa Rumah Jabatan Kepala Perwakilan, rumah jabatan tersebut terdiri atas dua lantai dengan luas 388 m². Fasilitas Rumah Jabatan Kepala Perwakilan terdiri atas 2 kamar tidur utama, 2 kamar tidur tamu, 1 kamar tidur pembantu, dapur, ruang tamu, ruang makan keluarga, dan garasi



Gambar 5. Rumah Dinas Jabatan Kepala Perwakilan

d) Rumah Jabatan Eselon III dan IV

Rumah Jabatan Eselon III dan IV menjadi satu dengan bangunan mess pegawai BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, pada Tahun 2020 dibangun Mess 3 lantai, dengan luas masing-masing lantai kurang lebih 876 m². Fasilitas Mess terdiri atas 42 kamar tidur yang dilengkapi dengan toilet pada masing- masing kamar, dapur, dan lobby, 3 aula, 1 mushala, dan 1 ruang pengelola

e) Fasilitas Ibadah

Pada tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara membangun Ruang Musholla seluas 78 m² yang diberi nama Musholla Al-Baitul Hasib. Musholla tersebut terletak dibagian gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di lantai 3 berada dekat dengan ruang studio.

f) Auditorium

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memiliki Bangunan Gedung Auditorium dengan dua lantai masing-masing seluas 904 m² dengan lantai satu diperuntukkan sebagai lobby yang dibangun pada Tahun 2019.



Gambar 6. Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

b. Peralatan dan Mesin pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Peralatan dan Mesin disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Pemeriksaan maupun pelaksanaan tugas penunjang, peralatan dan mesin berupa Alat Angkutan, Alat Besar, Alat Bengkel, Alat Ukur, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Peralatan Komputer, Alat kedokteran dan Alat Komunikasi.





Gambar 7. Kendaraan Operasional Roda 2 dan 4



Gambar 8. Lift dan Mesin Pompa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 9. Genset dan Traffo BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

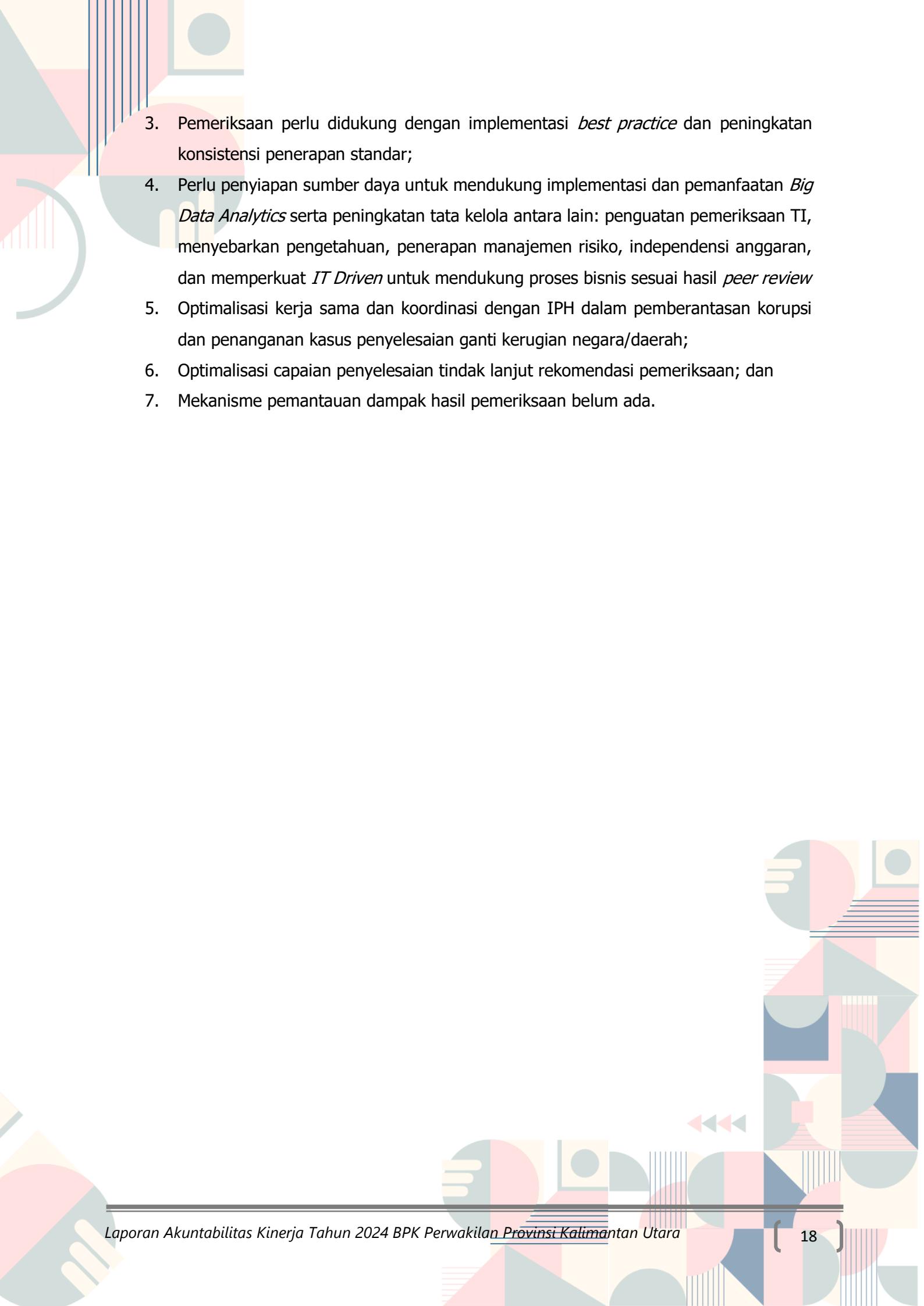
c. Aset Tetap Lainnya pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Aset tetap lainnya berada di Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 1274 buku, satu set alat musik berupa gitar, bass, drum, *keyboard*, *drum electric* dan sepuluh lukisan. Hingga tahun 2024, koleksi buku yang tersedia terdiri dari buku ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, kesehatan, kamus, dan beberapa jenis buku referensi lainnya. Koleksi buku ini dapat dipergunakan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

E. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

1. Berdasarkan laporan *peer review* tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* namun belum ke arah *impact*;
2. Pemeriksaan perlu lebih merespons isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;

- 
- 3. Pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
 - 4. Perlu penyiajan sumber daya untuk mendukung implementasi dan pemanfaatan *Big Data Analytics* serta peningkatan tata kelola antara lain: penguatan pemeriksaan TI, menyebarkan pengetahuan, penerapan manajemen risiko, independensi anggaran, dan memperkuat *IT Driven* untuk mendukung proses bisnis sesuai hasil *peer review*
 - 5. Optimalisasi kerja sama dan koordinasi dengan IPH dalam pemberantasan korupsi dan penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
 - 6. Optimalisasi capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan; dan
 - 7. Mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 disusun selaras dengan Renstra BPK 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 menjabarkan rancangan rencana lima tahunan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur piker pengembangan renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Melalui visi ini BPK akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dengan demikian, BPK akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat". Selaras dengan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tujuan

"Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat." Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi".

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh organisasi BPK termasuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut, yaitu:

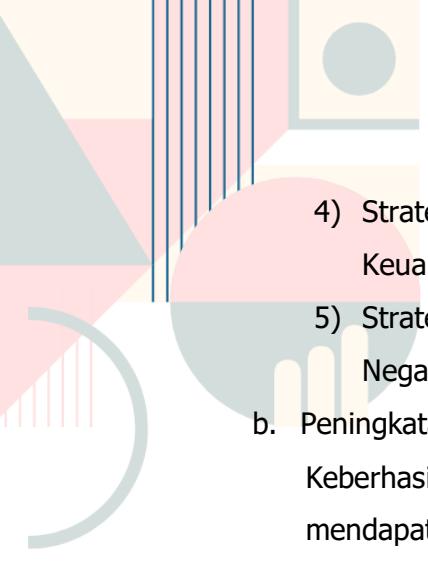
1. Independensi, yaitu BPK menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan. BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi;
2. Integritas, yaitu BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan;
3. Profesionalisme, yaitu BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis
- 2) Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif
- 3) Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

- 
- 4) Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
 - 5) Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
 - b. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Pada Tahun 2020, Renstra BPK telah disusun dan disahkan melalui Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024. Melalui Renstra 2020-2024, BPK telah menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK untuk lima tahun kedepan

Sesuai dengan Renstra 2020-2024, Visi BPK adalah:

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara"

Sedangkan Misi BPK 2020 - 2024 yaitu:

- 1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- 2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- 3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK telah menetapkan tujuan strategisnya untuk lima tahun kedepan yaitu:

"Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas Dan Bermanfaat"

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK telah menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 yaitu:

"Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi"

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020 – 2024 telah menetapkan dua arah kebijakan yaitu:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

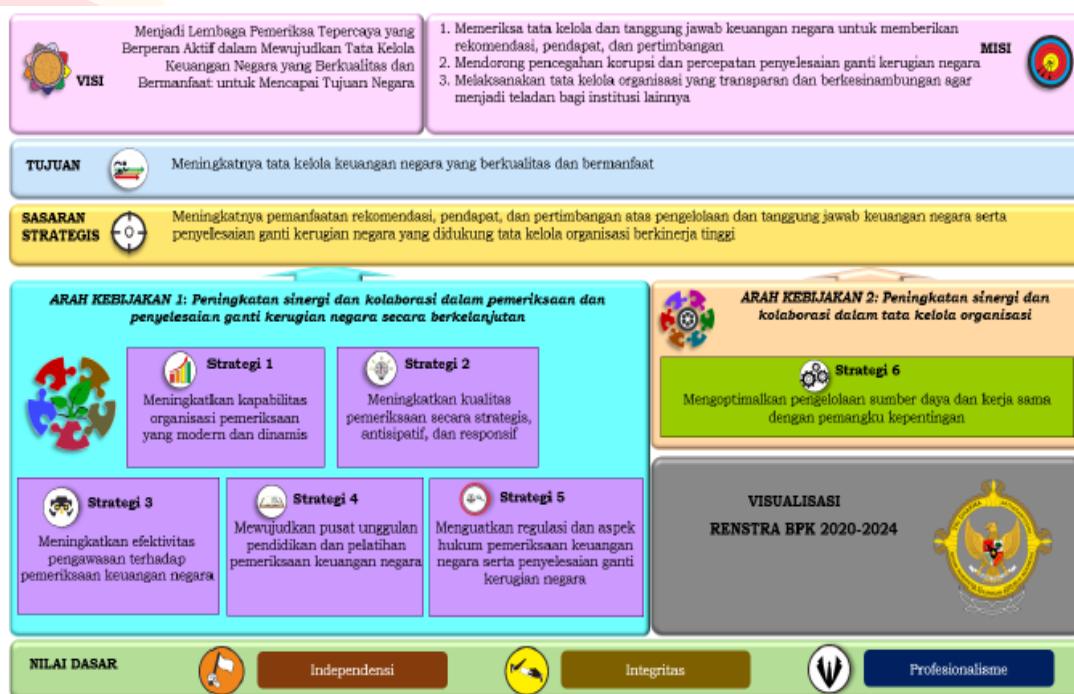
Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, yaitu:

- a. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis;
- b. Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif;
- c. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d. Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
- e. Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

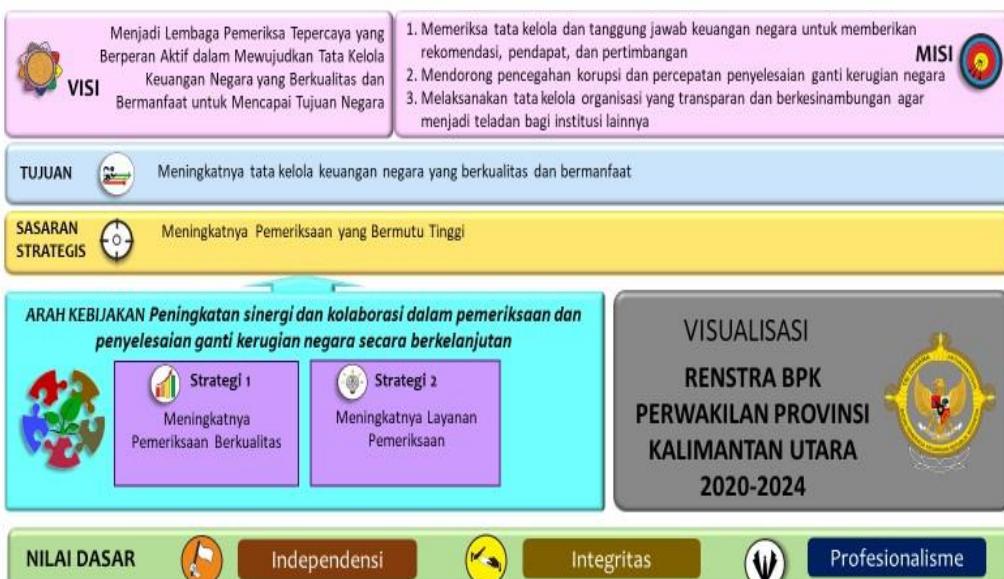
Strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, yaitu:
"Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan"

Berdasarkan Renstra BPK 2020 -2024, bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Stategis, Arah Kebijakan, dan Strategi BPK 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 10. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020–2024

Dalam mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun Renstra 2020-2024. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah disahkan di dalam Lampiran LXVII Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I Dan Eselon II Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024. Di dalam Renstra 2020-2024, Visi, Misi dan Tujuan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 juga sama dan sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Strategis BPK 2020-2024.



Gambar 11. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Berdasarkan Sasaran Strategis BPK 2020-2024, Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) sebagai salah satu unit eselon I BPK, yang mempunyai tugas, antara lain memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, telah menetapkan Sasaran Strategis AKN VI BPK 2020-2024 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif". Untuk mendukung Sasaran Strategis BPK dan AKN VI BPK 2020-2024 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu satuan kerja di AKN VI, telah merumuskan Sasaran Strategis pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 yaitu:

"Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi".

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan dua sasaran yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas.

Sasaran 2 : Meningkatnya Layanan Pemeriksaan.

Untuk mencapai dua sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator kinerja yang harus dicapai. Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024. PK 2024 tersebut berisikan 13 indikator kinerja yang harus dicapai selama Tahun 2024.

B. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun IKU beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara dan Auditor Utama Keuangan Negara VI. Sasaran, Indikator Kinerja dan target pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

Untuk mencapai dua sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator kinerja yang harus dicapai. Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja tahun 2024 tersebut berisikan 13 indikator kinerja yang harus dicapai selama Tahun 2024. Rencana Aksi Pencapaian target kinerja tahun 2024 secara detail terdapat pada **Lampiran 9**. Rincian penjelasan dari 13 Indikator Kinerja Utama tersebut lebih jelasnya adalah sebagai berikut.

a. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan, meliputi proses pengawasan dan reviu di tingkat tim serta hasil evaluasi EPP atas LHP yang telah diterbitkan untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan sehingga terjadi perbaikan pada pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*, ditindaklanjutinya seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas pelaksanaan pemeriksaan, dan berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS).

Pada Pemenuhan IKU 1 terkait Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan yang dicapai oleh BPK RI Kaltara pada

Keberhasilan pencapaian indikator ini dinilai pada sub komponen IKU, sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan;
- 2) Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan; dan
- 3) Hasil Evaluasi EPP, meliputi Tingkat Konsistensi atas LHP dan Tingkat Akurasi atas LHP.

b. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif atau TSAO (*Tentative Strategic Audit Objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pemeriksaan yang dilakukan harus pula disesuaikan atau memenuhi harapan penugasan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan. Keberhasilan pencapaian indikator ini dinilai dengan melihat kesesuaian antara simpulan dengan harapan penugasan dalam setiap pemeriksaan yang telah dilakukan dalam satu tahun anggaran.

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Semakin tinggi tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penilaian indikator ini dengan melakukan perbandingan antara (a) Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (b) Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (c) Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (d) Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (e) Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee*.

d. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG'.

e. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku

kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara turut mendukung Arah Kebijakan BPK melalui Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Penghitungan indikator ini dengan melakukan perbandingan antara jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK terhadap seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa.

f. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Penghitungan indikator ini dengan melakukan perbandingan antara realisasi pemeriksaan tematik lokal terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal.

g. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK merupakan Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Indikator ini dihasilkan berdasarkan hasil survei dari pihak

independen kepada seluruh pegawai di masing-masing satuan kerja dengan menggunakan skala tertentu.

Skala hasil survei tersebut yaitu:

- 1) 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2) 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3) 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4) 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

h. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- 1) AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- 2) A = Memuaskan (>80-90)
- 3) BB = Sangat Baik (>70-80)
- 4) B = Baik (>60-70)
- 5) CC = Cukup (>50-60)
- 6) C = Kurang (>30-50)
- 7) D = Sangat Kurang (0-30)

i. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (JASMIN), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, dan *Big Data Anaystic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pencapaian indikator ini dilakukan dengan melakukan penilaian atas layanan dasar, layanan aplikasi umum, serta layanan aplikasi pemeriksaan, dengan bobot sebagai berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM (20%);
- b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN (15%);

- c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP (20%);
- d. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP (20%); dan
- e. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL (25%)

j. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*) Penerapan *best practice* dan Aktivitas Manajemen Pengetahuan. *Best Practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan dan praktik terbaik setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Formula untuk penghitungan indikator ini yaitu:

A. Tingkat penyusunan *Best Practice*, dengan formula:

$$A = (a/b) \times 100\%$$

dimana : a. Jumlah usulan Best Practice yang disusun

b. Jumlah usulan Best Practice yang direncanakan untuk disusun

B. Tingkat penerapan *Best Practice* , dengan formula:

$$B = (c/d) \times 100\%$$

dimana : c. Jumlah Best Practice yang diterapkan

d. Jumlah Best Practice yang direncanakan untuk diterapkan

C. Tingkat pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP), dengan formula:

$$C = (e/f) \times 100\%$$

dimana : e. Jumlah aktivitas MP yang dilaksanakan

f. Jumlah aktivitas MP yang direncanakan untuk dilaksanakan

k. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Skala hasil survei untuk penilaian dari indikator ini yaitu:

- 1) 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2) 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3) 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4) 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

I. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Peningkatan kualitas organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara difokuskan pada pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas. Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan setiap tahun.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Penghitungan indikator ini yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat terhadap jumlah seluruh pegawai.

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014).
3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

m. Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran mengukur capaian kinerja atas pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran, melalui pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Perencanaan adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA Perencanaan diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari tiga indikator, yaitu:

- 1) Efektivitas;
- 2) Efisiensi Penggunaan SBK;
- 3) Nilai Efisiensi

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Pelaksanaan Anggaran adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Utama dan Direktorat PSMK, hasil evaluasi dari Itama atas AKIP atau Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Kalimantan Utara pada Tahun 2024 adalah sebesar 91,40. Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan tersebut dikategorikan sebagai kategori AA atau Sangat Memuaskan. Indikator ini menunjukkan pengukuran atau evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. Tujuan dari dilakukannya pengukuran indikator ini adalah untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker.

B. Capaian Kinerja

Pengelolaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA KINERJA meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara bersama Direktorat PSMK melakukan pengukuran secara bertahap dari mulai proses monitoring, evaluasi, hingga pelaporan. Pada Tahun 2024, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 101,29. Skor tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 1,91 Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut. (Skor capaian kinerja menyajikan target kinerja dan capaian kinerja Tahun 2022 s.d 2024).



Gambar 12. Perbandingan Skor Kinerja BPK Kaltara Tahun 2022 s.d 2024

Berdasarkan Gambar 12. Perbandingan Skor Kinerja BPK Kaltara Tahun 2022 s.d 2024, realisasi capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 mendapatkan skor kinerja sebesar 101,29 dengan target 2024 sebesa 100,00% atau dengan kategori Sangat Baik untuk kinerja organisasi. Realisasi kinerja organisasi pada Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 99,38 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 99,52. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya Penguanan Tata Kelola Organisasi, Perencanaan Strategis yang Efektif, Peningkatan Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi, Fokus pada Kualitas Hasil Pemeriksaan, Efektivitas Sistem Pengendalian dan Pengawasan, Pengelolaan Sumber Daya yang Optimal berupa efisiensi anggaran, serta Peningkatan Kepercayaan Publik pada BPK Perwakilan Kaltara.

Berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2024:

Tabel 8. Pencapaian Indikator Kinerja BPK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	96,00%	96
	1.1	Hasil QA dan QC Satker (Bobot 40%)		100%	
	1.2	Hasil Evaluasi EPP (Bobot 60%)		93,33%	
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100%	100
	2.1	Jumlah LHP yang Simpulannya sesuai dengan harapan penugasan		6	
	2.2	Jumlah LHP yang diterbitkan		6	
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	86,15%	105

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
3. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	3.1	Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti		4.420	
	3.2	Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses		710	
	3.3	Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti		7	
	3.4	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		40	
	3.5	Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee		5.177	
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,51%	100,51
	4.1	Realisasi pemeriksaan tematik nasional		3	
	4.2	Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional		3	
	4.3	Alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan		0,51	
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
	5.1	Jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK		6	
	5.2	Seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa		6	
	5.3	Alokasi skor untuk pemeriksa yang terlibat			
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja	100,00%	101,19%	101,19

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
		dalam Pemeriksaan Tematik Lokal			
6.1 Realisasi pemeriksaan tematik lokal				3	
6.2 Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal				3	
6.3 Alokasi skor untuk pemeriksa yang terlibat				1,19	
7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK		4,81	4,82	100,21	
8 Hasil Evaluasi AKIP		90,05 (AA)	91,40 (AA)	101,50	
9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi		98,00%	97,89%	99,88	
9.1 Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi SISDM (Bobot 20%)			100,00%		
9.2 Tingkat pemanfaatan Layanan Aplikasi JASMIN (Bobot 15%)			99,80%		
9.3 Tingkat pemanfaatan Layanan Aplikasi Pemeriksaan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) (Bobot 20%)			100,00%		
9.4 Tingkat pemanfaatan layanan Aplikasi SiAP (20%)			91,66%		
9.5 Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi SiPTL (Bobot 25%)			98,34%		
10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan		100,00%	110,00%	105	
10.1 Tingkat Penyusunan <i>Innovative Practice</i> (Bobot 50%)			100,00%		

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
	10.2	Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (Bobot 50%)		120,00%	
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,00	105
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100
	12.1	Jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat		65	
	12.2	Jumlah seluruh pegawai		65	
	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	91,40%	105
	13.1	Nilai EKA Perencanaan		85,00%	
	13.2	Nilai EKA Pelaksanaan		97,80%	
SKOR KINERJA					101,29

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan IV Tahun 2024 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar **101,29**. Secara keseluruhan, pencapaian skor kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:
 - a. IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; dan
 - b. IKU 9 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
2. Terdapat delapan Indikator Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:
 - a. IKU 3 tentang Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
 - b. IKU 4 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
 - c. IKU 6 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
 - d. IKU 7 tentang Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
 - e. IKU 8 tentang Hasil Evaluasi AKIP;
 - f. IKU 10 tentang Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;

- g. IKU 11 tentang Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; dan
 - h. IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran
3. Terdapat tiga Indikator Kinerja mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:
- a. IKU 2 tentang Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
 - b. IKU 5 tentang Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan; dan
 - c. IKU 12 tentang Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;

C. Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Skor Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Untuk mencapai visi misi dan tujuannya BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 sebagai berikut: "Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi"

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI merupakan satuan kerja eselon I yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran program dalam Perjanjian Kinerja AKN VI sebagai berikut: "Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif"

Dalam mendukung sasaran strategis AKN VI tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

"Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi"

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

**Sasaran Strategis
"Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi"
pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
Telah Memenuhi Target yang Telah Ditetapkan**

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Adapun penjelasan capaian Indikator Kinerja selama Triwulan IV Tahun 2024 secara keseluruhan sebagai berikut.

IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) dan eksternal melalui hasil penilaian evaluasi Direktorat EPP. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

Upaya pada *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) pemeriksaan dilaksanakan setelah pemeriksaan selesai. Sampai dengan akhir Tahun 2024 pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 telah selesai dilaksanakan, QA dan QC seluruhnya dilaksanakan pada enam LHP pemeriksaan LKPD TA 2023. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan empat Pemeriksaan Kinerja dan dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tahun 2024, dimana QA dan QC juga akan dilaksanakan seluruhnya pada 6 pemeriksaan tersebut. Hasil evaluasi Direktorat EPP berdasarkan data jumlah LHP yang dimuat dalam IHPS I 2024, dengan jumlah LHP yang dievaluasi sebanyak 6 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Realisasi capaian IKU 1 Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2022	2022	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100,00%
Realisasi	83,33%	88,57%	80,00%	78,00%	96,00%
Capaian Realisasi	83,33%	88,57%	80,00%	78,00%	96,00%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	83,33%	88,57%	80,00%	78,00%	96,00%

Realisasi IKU 1 pada Tahun 2024 adalah sebesar 96,00% dari target 100,00%. Sehingga capaiannya sebesar 96,00%. IKU ini diukur melalui dua sub IKU yaitu Sub IKU 1.1 tentang Hasil QA dan QC Satker (bobot 40%) dengan realisasi sebesar 100% dan Sub IKU 1.2 tentang Hasil Evaluasi Direktorat EPP (bobot 60%) dengan realisasi sebesar 93,33%, yang terdiri dari Tingkat Konsistensi atas LHP sebesar 83,33% dan Tingkat Akurasi atas LHP sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa tetap perlu adanya upaya perbaikan terhadap pada proses QA dan QC satker, sehingga LHP yang diterbitkan dapat memperoleh Tingkat Konsistensi dan Tingkat Akurasi yang lebih baik lagi kedepannya.

Realisasi IKU 1 pada Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2023, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 22,00%. Perolehan realisasi IKU ini pada Tahun 2024 merupakan perolehan realisasi tertinggi jika dibandingkan periode Renstra Tahun 2020-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Kendala atas Ketidakcapaian tersebut disebabkan oleh Hasil Evaluasi Akurasi dan Konsistensi atas LHP yang dimuat dalam IHPS 1 Tahun 2024 pada Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penyusunan IHPS 1 Tahun 2024 oleh Direktorat EPP atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan nilai 93,33%. Bila dirinci lebih lanjut, perhitungan nilai tersebut disebabkan oleh penilaian tingkat konsistensi atas LHP yang mendapatkan nilai 83,33% dengan rincian konsistensi jumlah LHP sebanyak 1 dari 6 LHP dan terdapat 3 jumlah kasus pada konsistensi. Penilaian tingkat akurasi mendapatkan nilai 100,00% dengan rincian akurasi angka jumlah LHP sebanyak 6 LHP dengan tidak ditemukannya jumlah kasus akurasi pada LHP tersebut.

Upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam pencapaian target IKU selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *cross review* internal antar tim Pemeriksa atas konsep LHP sebelum diterbitkan, dari setiap tim Pemeriksa setiap entitas pemeriksaan;
2. Meningkatkan Peran Tim Penjaminan Mutu;
3. Melakukan analisis risiko di tahap perencanaan pemeriksaan untuk menentukan fokus dan prioritas, serta pelaksanaan Mitigasi Risiko dengan Menyusun strategi mitigasi untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan;
4. Melaksanakan proses *checker* berjenjang terhadap kualitas mutu LHP.

Upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan terus melakukan reviu LHP secara berjenjang, mendorong tim pemeriksa untuk lebih memperhatikan konsistensi dalam penyusunan LHP, melakukan *cross*

review internal antar tim Pemeriksa atas konsep LHP sebelum diterbitkan, membuat sistem checker LHP agar dapat digunakan oleh setiap tim pemeriksa dalam melakukan *cross review*, Penguatan Sistem Pengendalian Mutu Internal (SPMI) berupa melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu Internal untuk mengidentifikasi kelemahan, Peningkatan Kompetensi SDM berupa mengadakan pelatihan dan sertifikasi untuk auditor agar memahami standar pemeriksaan dan pengendalian mutu terkini serta Coaching dan Mentoring untuk setiap pemeriksa.

Untuk mempertahankan pencapaian tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian mutu (*Quality Control*) dan pemerolehan keyakinan mutu (*Quality Assurance*) atas setiap Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan, Mengintegrasikan QA dalam setiap tahapan pemeriksaan untuk memastikan dokumen pemeriksaan sesuai standar dan Memanfaatkan *Big Data Analytics* untuk mendukung keyakinan mutu melalui analisis risiko dan deteksi penyimpangan yang lebih efektif. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan realisasi IKU ini dapat dipertahankan hingga periode Renstra tahun selanjutnya.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2024 sebesar Rp5.124.208.012 yang terdiri dari Rincian Ouput LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan Rincian Output LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Realisasi IKU tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

Dengan demikian IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan 2024. Berikut akan disajikan perbandingan capaian IKU 1 terhadap target jangka menengah sebagai berikut.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	96,00%	96,00%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 1 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya berusaha meningkatkan kualitas review hasil

pemeriksaan agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode Etik dan PMP.

IKU 2 – Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU 2 merupakan Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan Yang Memenuhi Harapan Penugasan. Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator kinerja ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP.

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan 12 Pemeriksaan di luar Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Partai Politik. Pemeriksaan tersebut terdiri dari enam Pemeriksaan atas LKPD, empat Pemeriksaan Kinerja dan dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menerbitkan enam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 yang terdiri dari LHP atas LKPD Pemprov Kalimantan Utara, LHP atas LKPD Pemkab Bulungan TA 2023, LHP atas LKPD Pemkab Nunukan TA 2023, LHP atas LKPD Pemkot Tarakan TA 2023, LHP atas LKPD Pemkab Tana Tidung TA 2023, dan LHP atas LKPD Pemkab Malinau TA 2023.

Kendala yang terjadi untuk mencapai IKU 2 diantaranya, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

- a. Penentuan tema, objek dan lingkup pemeriksaan tidak berdasarkan data dan kajian secara optimal.
- b. Keterbatasan alokasi anggaran pemeriksaan (anggaran kegiatan pemeriksaan perwakilan telah diplot oleh kantor pusat) sehingga tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan perwakilan;
- c. Tim pemeriksa tidak dapat mengakses Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) tim pemeriksa sebelumnya (didokumentasikan pada aplikasi SiAP LK) sebagai bahan untuk melakukan perencanaan pemeriksaan

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pemeriksaan, misalkan alat untuk melakukan pengujian fisik hasil pekerjaan konstruksi, transportasi menuju lokasi pemeriksaan, dll;

- b. Pihak ketiga (subjek konfirmasi) tidak mau bekerjasama menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemeriksa.

Upaya atau rencana aksi agar dapat mempertahankan capaian atas IKU ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan berupaya melakukan hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang diantaranya memuat tujuan dan harapan penugasan dari pemberi tugas/pimpinan dan prosedur atau Langkah-langkah pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa;
2. Memedomani Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK;
3. Mengikuti dan mematuhi jadwal (*timeline*) pemeriksaan sesuai arahan pimpinan;
4. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan entitas dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk dapat mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penilaian, seluruh pemeriksaan tersebut telah sesuai antara simpulan dengan harapan penugasan atau dengan realisasi sebesar 100%. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target kinerja di Tahun 2024. Selain itu, pencapaian pada Tahun 2024 tersebut sama dengan pencapaian pada Tahun 2023. Atas Pencapaian tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor IK sebesar 100. Realisasi capaian IKU 2 Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2022	2022	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100,00%

Realisasi IKU 2 pada Tahun 2024 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100%. Sehingga capaiannya sebesar 100%. IKU ini diukur melalui dua sub IKU yaitu jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan sebanyak enam LHP dan jumlah LHP yang diterbitkan sebanyak enam LHP. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah sesuai Simpulan yang terdapat pada LHP dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Realisasi Pencapaian IKU ini pada tahun 2024 sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan laporan evaluasi Direktorat EPP bahwa simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) pada Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Kendala atas Ketercapaian IKU tersebut diantara lain adalah perlunya ketelitian dan komitmen penuh agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pada pemeriksaan dapat berjalan dengan baik.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target IKU selama Tahun 2024 adalah melaksanakan reviu berjenjang, melaksanakan pengecekan silang serta *Quality Control* (QC) kesesuaian antara simpulan pada LHP dengan Program Pemeriksaan (P2) antar tim, membuat matriks kesesuaian simpulan yang terdapat pada LHP dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Kendala atas Ketercapaian IKU tersebut diantara lain adalah perlunya ketelitian dan komitmen penuh agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pada pemeriksaan dapat berjalan dengan baik.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU 2, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan, melaksanakan reviu berjenjang, melaksanakan pengecekan silang (QC) kesesuaian antara simpulan pada LHP dengan Program Pemeriksaan (P2) antar tim. Berikut akan disajikan perbandingan capaian IKU 2 terhadap target jangka menengah sebagai berikut.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibandingkan Target Kinerja Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 2 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya berusaha mempertahankan kualitas pemeriksaan. Realisasi IKU tahun 2024 akan menjadi baseline dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 3 – Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU 3 merupakan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Penilaian atas IKU ini menggunakan hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dalam kurun waktu 2005 s.d. 2024. Proses Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan juga telah menggunakan Aplikasi SMP dan SiPTL.

Berdasarkan hasil pantauan, dari total sebanyak 5.177 rekomendasi yang diberikan selama Tahun 2005 s.d. 2024 seluruh pemda di wilayah Kalimantan Utara telah menyelesaikan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4.420 rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 40 rekomendasi. Masih terdapat 710 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dan 7 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Berdasarkan pencapaian tersebut, maka Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selama Tahun 2005 s.d. 2024 adalah sebesar 86,15%, pencapaian tersebut telah melebihi target sebesar 75%. Atas pencapaian tersebut, skor kinerja atas IKU 3 adalah 105. Pada Triwulan IV Tahun 2024, pencapaian atas IKU 3 sebesar 86,15%, sehingga terdapat peningkatan sebesar 7,36%.

Tercapainya target IKU 3 tidak terlepas dari peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam mendorong *auditee* untuk melakukan percepatan tindak lanjut agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi yang diberikan. Secara rutin, setiap semester menyelenggarakan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara.

Realisasi capaian IKU 3 Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	86,50%	86,08%	85,84%	80,32%	86,15%
Capaian Realisasi	115,33%	114,77%	114,45%	107,09%	114,86%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	115,33%	114,77%	114,45%	107,09%	115%

Realisasi IKU 3 pada Tahun 2024 menggunakan data IHPS 1 Tahun 2024 dimana data realisasi tersebut sudah termasuk penambahan tindak lanjut yang telah dibahas dalam pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2024. Pada Semester II Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan percepatan penyelesaian TLRHP secara berkala. Hal ini dilaksanakan karena terdapat kecenderungan penurunan persentase penyelesaian TLRHP setiap periodenya.

Beberapa permasalahan atau kendala dalam penyelesaian TLRHP diantaranya yaitu.

- 1) Belum tersedianya pengaturan lebih lanjut atas pemberian sanksi pada pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sehingga menyebabkan penyelesaian TLRHP berlarut-larut;
- 2) Pemerintah Daerah tidak segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini seperti perubahan struktur organisasi dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Mekanisme penyelesaian TP/TGR di Pemerintah Daerah belum sepenuhnya optimal;
- 4) Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian TLRHP tersebut tidak dapat ditelusuri keberadaannya khususnya untuk rekomendasi-rekomendasi yang sudah lama.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat meningkatkan pencapaian IKU 3 ditahun selanjutnya diantaranya yaitu:

1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berperan aktif dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan mengevaluasi permasalahan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan atau yang berlarut-larut melalui program percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
2. Mendorong Pemerintah Daerah dengan membuat komitmen pencapaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada setiap periode.

Perbandingan realisasi IKU 3 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	86,15%	105,00%

Berdasarkan tabel tersebut Realisasi IKU tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara optimis dapat memenuhi target pada periode Renstra Tahun selanjutnya. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk melakukan evaluasi atas pencapaian dari tahun ke tahun agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara lebih efektif dan efisien.

IKU 4 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator kinerja ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategy pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang dan tugas fungsi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/mandatory, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 mendapatkan capaian kinerja sebesar 100,51% dari dari target 100,00% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian IKU 4 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100,00%
Realisasi	100,70%	100,28%	101,03%	100,36%	100,00%
Capaian Realisasi	100,70%	100,28%	101,03%	100,36%	100,51%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100,70%	100,28%	101,03%	100,36%	100,51%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU ini mengalami peningkatan sebesar 0,15. Namun demikian realisasi ini masih diatas target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan tiga pemeriksaan tematik nasional yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) dalam Upaya Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2022 s.d. Triwulan III 2024 pada Pemerintah Kota Tarakan dan Instansi Terkait Lainnya di Tarakan; dan
3. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan pencapaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 100,51. Pencapaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target di Tahun 2024 dengan target sebesar 100%,

Namun demikian terdapat peningkatan pencapaian kinerja apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang mencapai 101,36. Kendala yang dihadapi pada IKU tersebut disebabkan karena berkurangnya pemeriksaan tematik nasional yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Utara pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dan 2022, yaitu dari tiga pemeriksaan tematik nasional menjadi dua pemeriksaan tematik nasional.

Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dilaksanakan pada Semester II Tahun 2024. Pemeriksaan yang dinilai pada IKU 4 yaitu Pemeriksaan Kinerja yang termasuk ke dalam bagian tagging Tematik Nasional ataupun Lanjutan dari Prioritas Nasional pada Pemeriksaan.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target IKU selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi Internal, Mengikuti kegiatan rapat koordinasi reguler antara kantor pusat (pokja pemeriksaan) dan satker perwakilan BPK di daerah untuk menyamakan persepsi dan menyusun strategi pelibatan satuan kerja; Penguatan Kapasitas Satuan Kerja berupa Memberikan pelatihan khusus kepada satuan kerja terkait

- tema pemeriksaan nasional agar mereka memahami tujuan dan kontribusi yang diharapkan;
- Penyelarasan dengan Program Nasional, pelaksanaan Workshop Pemeriksaan Tematik Nasional dengan Pokja Pemeriksaan untuk seluruh satuan kerja pada BPK.

Berikut perbandingan realisasi IKU 4 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,51%	100,51%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 4 jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 sudah memenuhi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat meningkat capaiannya pada akhir Tahun 2024. Upaya Penyempurnaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan. Tema pemeriksaan tematik nasional yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan ditetapkan pimpinan BPK. Dari tema tersebut, dilakukan analisis berdasarkan perkembangan kondisi terkini untuk mendapatkan fokus pemeriksaan yang lebih rinci dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Realisasi IKU tahun 2024 akan menjadi baseline dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

IKU 5 yaitu Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan merupakan indikator kinerja yang baru dinilai pada Tahun 2021. Selama Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara tidak melakukan Pemeriksaan berdasarkan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan baik dari Lembaga Perwakilan maupun dari IPH. Atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 100. Pencapaian tersebut sama capaianya dengan target di Tahun 2024 dan pencapaian pada Tahun Renstra 2024.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Pada tahun 2024, realisasi IKU ini sebesar 100% dari target 100%. Pada tahun 2024, belum ada permintaan pemeriksaan dari pihak pemangku kepentingan sehingga IKU ini tetap merealisasikan 100% sehingga memenuhi target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, Upaya Penyempurnaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam mencapai target kinerja yaitu dengan melakukan komunikasi yang lebih proaktif dan responsif dalam memenuhi pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 5 Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	101%	100%	100%
Capaian Realisasi	100%	100%	101%	100%	100%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	101%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU ini pada Triwulan IV Tahun 2024 sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Hal dikarenakan tidak ada permintaan dari pemangku kepentingan pada tahun tersebut. Upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah Identifikasi Kebutuhan Pemangku Kepentingan berupa Melakukan survei atau forum komunikasi dengan pemangku kepentingan (Parlemen, pemerintah, masyarakat, dan lembaga donor) untuk memahami kebutuhan informasi dan pemeriksaan, Memastikan laporan pemeriksaan sesuai dengan fokus dan kebutuhan informasi pemangku kepentingan, seperti efektivitas anggaran, tata kelola, atau dampak sosial, membuka akses publik terhadap laporan pemeriksaan yang relevan (kecuali yang bersifat rahasia) untuk meningkatkan kepercayaan, dan Mengembangkan sistem pemantauan yang memastikan pemangku kepentingan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Berikut perbandingan realisasi IKU 5 pada Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 5 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk dapat responsif dalam memenuhi pemeriksaan dari para pemangku kepentingan, diharapkan capaian kinerja ini dapat dipertahankan.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator Kinerja Utama ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's). Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Realisasi IKU ini Pada Tahun 2024 mendapatkan capaian kinerja sebesar 101,19% dari target 100,00% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan capaian IKU 6 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100,00%
Realisasi	100%	100,18%	100,46%	100%	100,00%
Capaian Realisasi	100	100,18	100,46	100	100,19
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100%	100,18%	100,46%	100%	101,19%

Realisasi IKU 6 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 101,19. Pencapaian tersebut telah melebihi target di Tahun 2024 sebesar 100. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang pencapaiannya sebesar 100, maka terdapat peningkatan nilai kinerja pada Tahun 2024 sebesar 1,19, hal ini dikarenakan Tagging kebijakan pemeriksaan pada tahun 2024 sudah sesuai dengan kebijakan tagging pemeriksaan yang sudah ditentukan oleh Direktorat PSMK dan Direktorat EPP, baik pemeriksaan yang termasuk ke dalam kebijakan pemeriksaan, Prioritas Nasional, Program Prioritas, *Quick Wins*, Sub Fokus Pemeriksaan, Sub Bidang, serta SDG's.

Berdasarkan pencapaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja 101,19 pada periode Triwulan IV 2024. Pencapaian tersebut lebih tinggi jika dibanding target di Tahun 2024 dengan target sebesar 100%. Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal dilaksanakan pada Semester II Tahun 2024. Pemeriksaan yang dinilai pada IKU 6 yaitu Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang termasuk ke dalam bagian tagging Tematik Lokal ataupun Pemeriksaan sesuai mandat pada suatu wilayah.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada indikator kinerja ini yaitu dengan membuat perencanaan dan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal yang selaras dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's) sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan. Perencanaan pemeriksaan tematik lokal dapat ditentukan dari penyusunan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) Tahun Anggaran 2024.

Tema pemeriksaan tematik lokal yang akan dilaksanakan oleh BPK akan ditetapkan pimpinan BPK. Dari tema tersebut, dilakukan analisis berdasarkan perkembangan kondisi terkini untuk mendapatkan fokus pemeriksaan yang lebih rinci dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Dengan menerapkan berbagai langkah di atas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024 dan capaian kinerja dapat meningkat pada Tahun 2024. Realisasi IKU tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

Upaya Pada Tahun 2024, Satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terlibat dalam tiga pemeriksaan tematik lokal yaitu.

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024

pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor dan Instansi Terkait Lainnya; dan

3. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Malinau di Malinau dan Instansi Terkait Lainnya.

Berikut perbandingan realisasi IKU 6 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	101,19%	101,19%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 6 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya berupaya menyusun rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG'S.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Terkait pencapaian Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Untuk menjaga integritas dan kredibilitas kelembagaan BPK RI, perlu dukungan dari seluruh unsur pegawai yang ada di dalam organisasi. Setiap pegawai bertanggung jawab untuk memahami visi, misi dan nilai dasar BPK sebagai bahan yang melekat pada dirinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pencapaian realisasi kinerja IKU ini pada Tahun 2024 sebesar 4,82 dengan target 4,81, mendapatkan skor kinerja sebesar 100,21%. Realisasi IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan Tahun 2023, Hal tersebut menunjukkan terjadi peningkatan pada pemahaman pegawai terhadap implementasi nilai dasar BPK, adanya perbaikan yang terjadi terhadap survey indikator kinerja BPK, terjadi perbaikan pada mekanisme pengukuran survey indeks indikator kinerja BPK yang

dilakukan guna meningkatkan IKU tersebut. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei oleh pihak *independent*.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja diantaranya yaitu para pegawai pada BPK Perwakilan Kalimantan Utara masih belum sepenuhnya memahami mengenai implementasi Nilai Dasar BPK, terdapat pegawai yang tidak serius dalam mengisi survei tentang Implementasi Nilai Dasar BPK, serta adanya pegawai yang belum mengisi survei terkait Implementasi Nilai Dasar BPK yang dilakukan oleh pihak ketiga. Walaupun terjadi peningkatan pada kinerja ini tentunya masih perlu mendapat perhatian bagi BPK Perwakilan Kalimantan Utara, sehingga pencapaian pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat dan memenuhi target Renstra tahun selanjutnya.

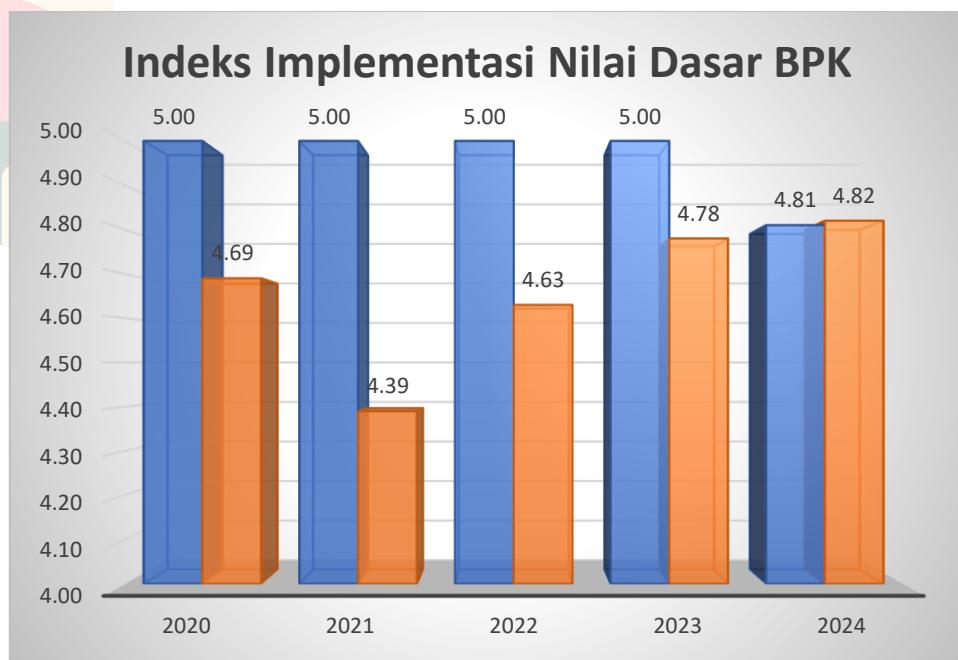
Upaya perbaikan serta penyempurnaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yaitu dengan komunikasi kepada Direktorat PSMK dengan meminta saran dan masukan terkait upaya untuk meningkatkan Implementasi Nilai Dasar BPK kepada para pegawai BPK. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah melakukan sosialisasi dalam bentuk konkret, melaksanakan KTF terkait implementasi nilai dasar BPK, Pelatihan dan Kesadaran, memperbarui kode etik dan pedoman perilaku yang mencakup nilai-nilai dasar, memastikan bahwa setiap pegawai memahami dan mematuhi kode etik tersebut, Meningkatkan komitmen pimpinan terhadap implementasi nilai-nilai dasar melalui dukungan dan contoh yang baik, menerapkan *system* penghargaan dan sanksi, mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai dalam memelihara nilai-nilai organisasi dan menarik serta untuk meningkatkan pengawasan implementasi nilai dasar kepada seluruh pegawai dan pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 7 Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81
Realisasi	4,69	4,39	4,63	4,78	4,82
Capaian Realisasi	93,80	87,80	92,60	95,60	100,21
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	93,80	87,80	92,60	95,60	100,21%

Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan capaian lima tahun terakhir Jika disajikan dalam bentuk grafik dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 13. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut realisasi ini mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Atas realisasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan evaluasi dan terus mendorong para pegawai untuk meningkatkan implementasi Nilai Dasar BPK di lingkungan kerja, maupun dalam kehidupan.

Berikut perbandingan realisasi IKU 7 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 Terhadap Target Jangka Menengah dalam Renstra BPK 2020-2024

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81	4,82

Pencapaian IKU ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sudah memenuhi target Renstra 2020-2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berupaya untuk terus mendorong pencapaian IKU ini dengan mengoptimalkan pembinaan pegawai tentang pemahaman visi, misi dan implementasi nilai-nilai dasar.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Indikator ini menunjukkan pengukuran atau evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. Tujuan dari dilakukannya pengukuran indikator ini adalah untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Pengukuran indikator ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah dijelaskan pada Sub bab Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024.

Sesuai dengan informasi dari Inspektorat Utama dan Direktorat PSMK, hasil evaluasi dari Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Kalimantan Utara pada Triwulan IV Tahun 2024 mendapatkan nilai 91,40 penilaian evaluasi AKIP oleh Tim Evaluator dan Reviu. Realisasi IKU 8 pada Triwulan IV Tahun 2024 mendapatkan realisasi 91,40 (AA) dengan target sebesar 90,05 (AA) mendapatkan skor kinerja sebesar 101,50. Pencapaian kinerja Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target IKU selama Tahun 2024 adalah membangun budaya organisasi berorientasi pada akuntabilitas, meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan melengkapi semua sub komponen pada LAKIN, membuat matriks monitoring setiap komponen Evaluasi AKIP berupa pengukuran kinerja, perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, membuat matriks perhitungan dan perbandingan tindak lanjut dari rekomendasi ITAMA terkait hasil evaluasi kinerja.

Kendala atau kelemahan yang dihadapi untuk mempertahankan serta meningkatkan target pada indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan manajemen kinerja yang masih berorientasi pada *output* dari pada *outcome*;
2. Kualitas perencanaan kinerja yang belum menggambarkan alur logika program dan kinerja yang logis yang dapat terukur dan tercapai oleh satuan kerja;
3. Penetapan kinerja baik kinerja utama maupun kinerja sasaran atau kinerja program yang belum berorientasi hasil (*outcome*);
4. Belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan serta dibahas dalam LAKIN;
5. Belum dimanfaatkan LAKIN dan evaluasi AKIP dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.

Upaya dan langkah perbaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan capaian kinerja atas IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP yaitu sebagai berikut:

1. Membangun budaya organisasi berorientasi pada akuntabilitas;
2. Revisi dokumen perencanaan baik rencana strategis, rencana kinerja, serta penetapan kinerja melalui perumusan sasaran yang spesifik (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat

dicapai (*achivable*), berorientasi hasil (*Result Oriented*), yang dapat dicapai dalam periode atau satuan waktu tertentu (*time-bound*) atau dikenal dengan istilah SMART;

3. Perumusan kembali indikator kinerja utama yang belum berorientasi hasil (outcome);
4. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja internal AKIP pada manajemen kinerja;
5. Pemanfaatan informasi kinerja dalam manajemen kinerja AKIP pada pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 8 Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
Realisasi	A (88,59)	A (89,58)	A (89,82)	A (87,10)	AA (91,40)
Capaian Realisasi	103,01	104,16	102,07	97,87	101,50
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	98.38%	99.48%	99.74%	96.72%	101,50%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi capaian kinerja IKU ini sebesar 91,40 (AA) dengan target Tahun 2024 sebesar 90,05 (AA). Sehingga mendapatkan skor kinerja 101,50%. Terdapat peningkatan sebesar 4,3% dari realisasi Tahun 2023. Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk meningkatkan capaian target setiap tahunnya dengan terus memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Itama.

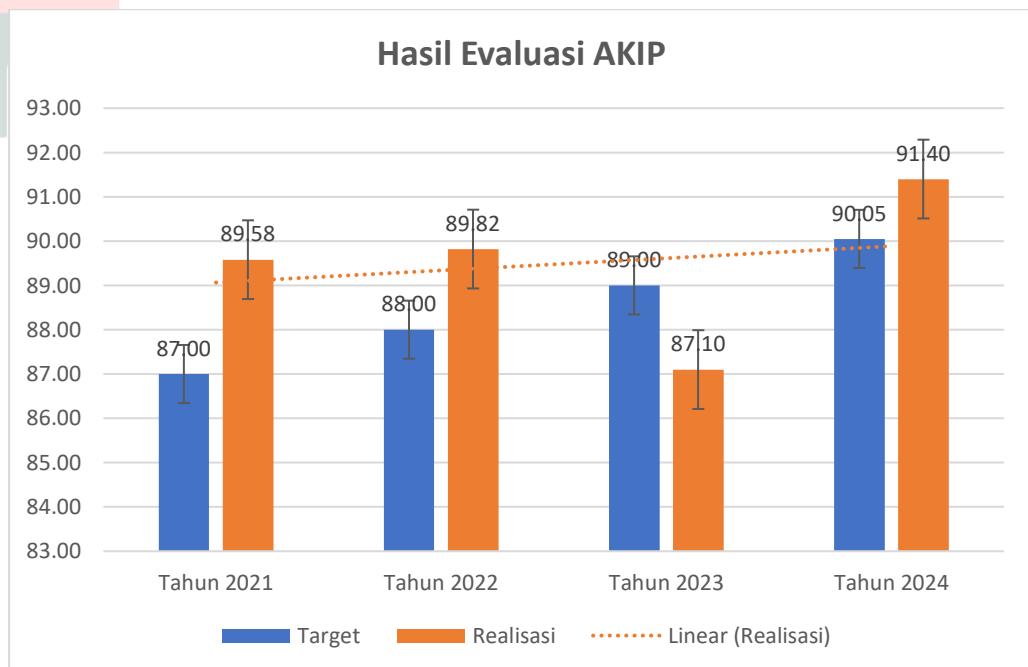
Berikut perbandingan realisasi IKU 8 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (91,40)	101,50

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian IKU 8 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah memenuhi target Renstra Tahun 2024 serta sudah mencapai target Renstra Tahun 2020 sampai dengan 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk melakukan perbaikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk tahun selanjutnya, dengan memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan sehingga tersaji informasi yang

informatif dan relevan. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan capaian tiga tahun terakhir jika disajikan dalam bentuk grafik dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 14. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

Iku 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (JASMIN), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP dan SiPTL) Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 9 Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95,00%	95,00%	97,00%	98,00%	98,00%
Realisasi	99,59%	99,59%	92,52%	97,16%	97,88%
Capaian Realisasi	104,83%	104,83%	95,38%	99,14%	105
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	101.62%	101.62%	94.41%	99.14%	99,88%

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi IKU 9 Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 97,88% dari target Tahun 2024 sebesar 98,00% sehingga capaian kinerja belum memenuhi target dan skor kinerja sebesar 99,88. Hal ini disebabkan oleh sebagai berikut:

1. Terjadinya miss koordinasi antara Pokja Pemeriksaan dengan Biro TI dan Direktorat PSMK terkait penggunaan Aplikasi SiAP pada Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan DTT, sehingga dalam data *Big Data Analytics* perhitungan SiAP tetap dihitung sebagai sub komponen perhitungan untuk SiAP Validasi HP3 KT;
2. Kurangnya monitoring terhadap pegawai dalam memanfaatkan layanan teknologi dan informasi dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi baik dalam kegiatan teknis pemeriksaan maupun kegiatan non teknis pada satuan kerja berupa aplikasi SiAP, SMP, SiPTL, SISDM dan JASMIN; dan terdapat tambahan perhitungan sub komponen seminar pada SISDM yang baru diterapkan bulan November 2024.

Capaian realisasi IKU 9 telah mencapai 99,88% dari target Tahun 2024. Realisasi IKU ini pada Triwulan IV Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 0,72%. Target pencapaian IKU ini, setiap tahunnya mengalami kenaikan target, pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 98%. Meskipun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya agar dapat mengoptimalkan capaian kinerja pada IKU ini dengan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Monitoring data pemanfaatan Teknologi Informasi pada Aplikasi *Big Data Analytics* BPK RI pada periode bulanan dan Triwulan Tahun 2024;
2. Membuat matriks *database* kekurangan pada sub komponen perhitungan di setiap Aplikasi yang menjadi perhitungan IKU 9;
3. Melakukan mekanisme *door to door* ke setiap pegawai baik penunjang pendukung dan pemeriksa untuk mengecek bagian komponen perhitungan pada Aplikasi SISDM; dan
4. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan penginputan PKP pada Aplikasi SiAP hingga tahapan HP3 Validasi KT (Ketua Tim).

Realisasi IKU 9 pada Triwulan IV Tahun 2024 mengalami peningkatan nilai capaian kinerja dibandingkan dengan Tahun 2023. Peningkatan capaian kinerja tersebut didukung oleh peran pimpinan terhadap arahan yang diberikan untuk terus melakukan evaluasi dan terus mendorong para pegawai untuk meningkatkan pemanfaatan layanan teknologi dan sistem informasi pada setiap jenis pekerjaan pada jabatan dan fungsi, terlebih khusus pada pemanfaatan aplikasi SISDM, JASMIN, SMP, SiAP, dan SiPTL.

Upaya dan langkah perbaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan capaian kinerja atas IKU 9 pada periode Renstra berikutnya yaitu sebagai berikut:

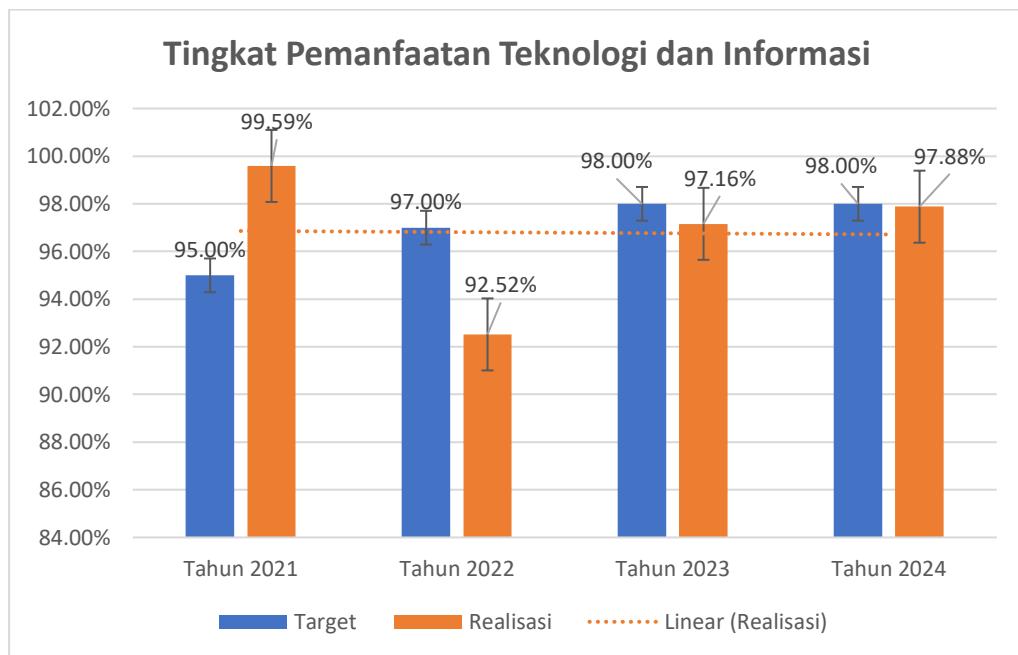
1. Meningkatkan kesadaran pegawai terkait pentingnya pemanfaatan teknologi informasi baik aplikasi untuk kegiatan teknis pemeriksaan maupun non teknis;
2. Melaksanakan sosialisasi terkait teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dan triwulan terhadap penggunaan aplikasi teknis pemeriksaan SMP, SiAP, SiPTL, dan aplikasi layanan dasar berupa JASMIN dan SISDM menggunakan tools yang digunakan oleh satker; dan
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai, terkait sub komponen perhitungan apa saja yang dilakukan pada IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Periode Renstra selanjutnya. Pada Triwulan IV Tahun 2024 tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 97,89% dengan rincian Sub IKU sebagai berikut.

- a. Realisasi Sub IKU 9.1 tentang Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM sebesar 100,00% (Bobot 20%);
- b. Realisasi Sub IKU 9.2 tentang Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN sebesar 99,80% (Bobot 15%);
- c. Realisasi Sub IKU 9.3 tentang Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi Pemeriksaan SMP sebesar 100,00% (Bobot 20%);
- d. Realisasi Sub IKU 9.4 Tingkat pemanfaatan aplikasi pemeriksaan SiAP sebesar 91,66% (Bobot 20%); dan
- e. Sub IKU 9.5 Tingkat Pemanfaatan aplikasi SiPTL sebesar 98,34% (Bobot 25%)

Jika ditarik data dari target dan realisasi pencapaian IKU 9 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan dari capaian realisasi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik dapat disajikan sebagai berikut.



Gambar 15. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Empat Tahun Terakhir Berdasarkan tabel dan grafik tersebut realisasi ini mengalami penurunan dan peningkatan dalam capaian realisasi pada empat tahun terakhir. Kendala atau hambatan yang dihadapi pada capaian kinerja IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya monitoring evaluasi setiap triwulan terhadap penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi teknis pemeriksaan SMP, SiAP, SiPTL, dan aplikasi layanan dasar berupa JASMIN dan SISDM;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pemanfaatan teknologi dan informasi pada seluruh pegawai, baik pelaksana, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam menunjang kinerja pada setiap jenis pekerjaan pada jabatan dan fungsi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berupaya terus melakukan evaluasi dan terus mendorong para pegawai untuk meningkatkan pemanfaatan layanan teknologi dan sistem informasi pada setiap jenis pekerjaan pada jabatan dan fungsi.

Berikut perbandingan realisasi IKU 9 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 Terhadap Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	98%	97,89%	99,88%

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian IKU 9 pada Tahun 2024 belum memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi setiap tahunnya dengan meningkatkan kesadaran pegawai baik dalam hal kualitas layanan TIK sendiri maupun dengan melaksanakan sosialisasi pemanfaatan aplikasi teknologi informasi kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara serta membuka layanan tanya jawab dan bantuan konsultasi tingkat pemanfaatan TI. Realisasi IKU tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode- metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 10 Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2021	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100,00%
Realisasi	100%	100%	100%	110%	110,00%
Capaian Realisasi	100%	100%	100%	110%	105
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	110%	110,00%

Realisasi IKU 10 Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 110,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaian kinerja diperoleh 105. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pada capaian kinerja IKU tentang Penerapan Manajemen Pengetahuan. Pada Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU ini sama jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh peningkatan jumlah aktivitas manajemen pengetahuan dan penyusunan *best practice* yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan IV Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 terdapat hanya terdapat dua unsur penilaian yaitu mencakup tingkat penyusunan atau penerapan *best practice* dengan bobot 50% dan tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan dengan bobot 50%.

Upaya yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian atas IKU ini adalah sebagai berikut:

1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan IV Tahun 2024 telah melaksanakan dan mengirimkan Usulan *Best Practice* kepada Direktorat PSMK dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 231a/ND/XIX.TJS/09/2024 tanggal 18 September 2024 dengan Judul "SIPUSKA (Sistem Informasi Perpustakaan BPK Kaltara) Digitalisasi & Optimalisasi Pengelolaan Aset Monografi" pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara" dan mendapatkan Nota Dinas Hasil Penilaian BP dari Kepala Direktorat PSMK dengan Nomor 664/ND/XII.1/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
2. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan IV Tahun 2024 juga telah melaksanakan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP). Kegiatan MP yang telah

dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara selama Triwulan IV Tahun 2024 sebanyak 25 kegiatan, yaitu:

- a. *Knowledge Transfer Forum (KTF) Sharing Session* berbasis pengetahuan pada Pengendalian Gratifikasi pada BPK Perwakikan Provinsi Kalimantan Utara, KTF Penyusunan Gaji Pegawai Melalui Aplikasi Web Gaji, KTF *Sharing Session* Sosialisasi Pengenalan Aplikasi E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Laporan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 43/ND/XIX.TJS/02/2024 tanggal 6 Februari 2024;
- b. *Blogging* Catatan Berita Analisis Hukum Periode Bulan Januari - Maret. Laporan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 77/ND/XIX.TJS/3/2024 tanggal 20 Maret 2024;
- c. *Knowledge Transfer Forum (KTF)* Pengelolaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa. Laporan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 78/ND/XIX.TJS/03/2024 tanggal 25 Maret 2024;
- d. *Knowledge Transfer Forum (KTF)* Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, KTF *Data Analytic Challenge* dan *Capture The Flag* Satuan Kerja BPK Perwakilan Kalimantan Utara, KTF Prosedur Analitis pada Laporan Keuangan, dan KTF Pemeriksaan atas Kas Daerah. Laporan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 96/ND/XIX.TJS/04/2024 tanggal 3 April 2024;
- e. *Knowledge Transfer Forum (KTF)* KTF Deteksi Kecurangan Pengadaan Melalui E-Katalog, KTF Infrastruktur, KTF Layanan Informasi Hukum Melalui Tanjik Hukum Online Bagi Stakeholder Internal dan Eksternal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, KTF Optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Umum dan TI (SIPUTIK), KTF Manajemen Event pada Instansi Pemerintah, *Sharing Session* dan *Knowledge Transfer Forum* pada Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 240/ND/XIX.TJS/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024;
- f. *Knowledge Transfer Forum (KTF)* Pelayanan Informasi Publik pada Pemeriksaan BPK RI, KTF Manajemen Pengetahuan Sosialisasi Edukasi Pengendalian Gratifikasi pada BPK RI, KTF Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Hukum Perundang-undangan Tata Kelola Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, dan Laporan Hasil

- Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan KTF Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Pemeriksaan Keuangan Negara pada BPK RI. Laporan Kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 311/ND/XIX.TJS/12/2024 tanggal 24 Desember 2024;
- g. Pelaksanaan Aktivitas Bantuan Rekan Sejawat (*Peer Assisst*) Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2025, *Sharing Session* dan *Knowledge Transfe Forum* Layanan Manajemen Legislasi Hukum, Kegiatan Reviu Pasca Aktivitas / *After Action Review* (ARR) *Top Exercise* (TTX) Kesiapsiagaan Bencana di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Laporan Hasil Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan *Peer Assisst* Manajemen Konstruksi dan Manajemen Infrastruktur Dalam Pemeriksaan BPK RI. Laporan Kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 311/ND/XIX.TJS/12/2024 tanggal 24 Desember 2024; dan
- h. Kegiatan Pelaksanaan Aktivitas *Coaching* pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Laporan Kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 311/ND/XIX.TJS/12/2024 tanggal 24 Desember 2024;

Realisasi IKU ini telah melebihi target Triwulan IV 2024. Diharapkan capaian ini dapat ditingkatkan pada Tahun Renstra berikutnya. Berdasarkan pencapaian tersebut, atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 105. Pencapaian tersebut telah melebihi target di Tahun 2024 dan sama dari pencapaian Tahun 2023. Kendala yang dihadapi untuk dapat mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Terhambatnya pengambilan keputusan karena kurangnya informasi;
2. Belum optimal dalam mengakses informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan;
3. Sulit menemukan cara efisien dalam mencatat wawasan atau pengetahuan terkait bisnis proses pada suatu organisasi, kesulitan dalam pengelolaan informasi;
4. Tidak tercukupinya sumber daya yang cukup baik berupa waktu, uang, dan sumber daya manusia, Resistensi terhadap perubahan, Kurangnya Kualitas Data dan Pengetahuan; dan
5. Kekurangan integrasi sistem, masalah keamaan informasi, kurangnya keterlibatan pengguna dalam hal ini adalah pegawai.

Berikut perbandingan realisasi IKU 10 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian IKU 10 pada Triwulan IV Tahun 2024 telah memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 Terhadap Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	110,00%	105,00%

Dalam upaya penyempurnaan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berusaha untuk mempertahankan capaian IKU ini dengan melakukan aktivitas manajemen pengetahuan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun, pendukung dan komitmen dari pimpinan, melakukan komunikasi efektif, melibatkan seluruh pegawai, pelatihan dan peningkatan kompetensi keahlian, alokasi sumber daya yang cukup, perbaikan data dan pengetahuan, integrasi sistem, pengelolaan perubahan yang efektif, penyusunan kebijakan keamanan informasi, melakukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan, dan melakukan penyempurnaan berbasis umpan balik (*feed back*) terhadap pelaksanaan Manajemen pengetahuan.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK. Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. IKU ini berdasarkan hasil survei pengukuran indikator yang dilaksanakan oleh lembaga independen yang dilaksanakan secara tahunan, dengan sasaran responden eksternal.

Realisasi IKU 11 Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 4,00 dari target sebesar 3,80, sehingga capaian kinerja diperoleh 105. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pada capaian kinerja IKU tentang Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi. Pada Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU ini lebih tinggi dibandingkan triwulan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh peningkatan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi vertikal, instansi horizontal, entitas pemeriksaan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2024.

Berikut adalah beberapa faktor pendukung atas peningkatan nilai indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi Transparansi pada komunikasi, Konsistensi Pesan, Partisipasi Pemangku Kepentingan, Responsif terhadap umpan balik terhadap pemangku kepentingan, Keterbukaan terhadap Kritik dan Saran, Pelatihan Komunikasi dan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Komunikasi.

Kendala yang dihadapi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian atas IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya
2. Ketidakmampuan Menangani Krisis Komunikasi
3. Kurangnya Kesinambungan Komunikasi
4. Kurangnya Pelatihan Komunikasi
5. Tidak Adanya Perencanaan Krisis Komunikasi

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 11 Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi	4,08	4,06	4,10	4,42	4,00
Capaian Realisasi	107,36%	106,84%	107,89%	116,31%	105,26%
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	107,36%	106,84%	107,89%	116,31%	105,26

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja pada IKU ini, tetap diperlukan perbaikan kualitas komunikasi yang dilakukan kepada pemangku kepentingan. Beberapa upaya perbaikan atau penyempurnaan pada IKU ini oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dilakukan, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil yaitu Analisis Kebutuhan Pemangku Kepentingan, Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Peningkatan Transparansi, Diversifikasi Saluran Komunikasi, Pelatihan Komunikasi, Mekanisme Umpan Balik, Perencanaan Krisis Komunikasi, Konsistensi dan Kesinambungan, Keterbukaan terhadap Kritik, Pemberdayaan Pemangku Kepentingan, dan Peningkatan Kesadaran Budaya dan Linguistik.

Berikut perbandingan realisasi IKU 11 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,00	105

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 11 pada Tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi target Renstra sampai dengan tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai sesuai standar pengembangan kompetensi di BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut.

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014).
3. Standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Realisasi IKU 12 Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaian kinerja sebesar 100. Hal ini mengindikasikan bahwa IKU 12 sudah mencapai Target Renstra 2020-2024. Realisasi IKU ini pada Triwulan IV Tahun 2024 sama jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh Komitmen Pemimpin dan Manajemen, Perencanaan Strategis Pelatihan Diklat, Anggaran yang memadai, Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Partisipasi aktif seluruh pegawai, Fleksibilitas Waktu dan Metode Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan, Pengakuan dan Insentif serta Pembelajaran Berkelanjutan.

Kendala yang dihadapi untuk mempertahankan capaian kinerja pada IKU 12, diantaranya yaitu prioritas tugas utama, kesulitan penjadwalan, tingginya beban kerja,

kurangnya kesadaran dan motivasi karyawan, tidak ada sistem evaluasi yang efektif, perubahan kebijakan internal serta keterbatasan anggaran.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 12 Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 dengan Capaian LimaTahun Terakhir

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 12 dalam lima tahun terakhir memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 65 pegawai dari 65 pegawai yang telah memenuhi standar jam pelatihan. Upaya Penyempurnaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 untuk dapat mempertahankan capaian IKU ini yaitu dengan berperan aktif dalam mengikutkan pegawai pemeriksa maupun non pemeriksa mengikuti diklat di Badan Diklat secara *distance learning* maupun diklat secara luring pada Badan Diklat BPK RI, melaksanakan diklat mandiri di Kantor Perwakilan, melakukan perencanaan yang lebih matang, evaluasi kebutuhan diklat, penyediaan anggaran yang cukup, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, kolaborasi dengan pihak eksternal serta penggunaan sistem manajemen diklat secara terstruktur.

Berikut perbandingan realisasi IKU 12 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 12 sampai dengan Tahun 2024, diharapkan dapat memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. Dalam upaya

mempertahankan pencapaian IKU 12 untuk setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pegawai pemeriksa mengikuti diklat mandiri maupun diklat di Badan Diklat PKN BPK RI.

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

IKU 13 yaitu Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran. tingkat Kinerja Implementasi Anggaran mengukur capaian kinerja atas pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran, melalui pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA. EKA adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas anggaran.

EKA terhadap Perencanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA Perencanaan Anggaran adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran pada Satuan Kerja diukur dengan EKA Perencanaan Anggaran sesuai KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, yang diukur dengan tiga variabel, yaitu:

1. Efektivitas, diukur dengan capaian Rincian Output;
2. Penggunaan SBK; dan
3. Efisiensi SBK

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas perencanaan dan penggunaan anggaran berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang dilakukan pada Satuan Kerja yang memiliki dokumen berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mandiri.

IKU ini menunjukkan bagaimana upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Pencapaian indikator ini menggunakan dua penilaian yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Pemberian nilai untuk masing-masing indikator akan dihitung oleh Biro Keuangan.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Cakupan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) meliputi EKA Reguler dan EKA Nonreguler sebagai salah satu instrument penerapan berbasis kinerja

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 13 Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%	84,50%
Realisasi	92,60%	90,94%	90,20%	89,55%	91,40%
Capaian Realisasi	106,43%	103,93%	102,50%	101,18%	105%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan Terhadap Target Tahun 2024	109.59%	107.62%	106.75%	105.98%	108.17%

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 91,40% dari target sebesar 84,50%, sehingga capaian kinerja sebesar 105. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi IKU 13 sudah melebihi target tahun 2024.

Apabila terjadi penurunan realisasi capaian kinerja tingkat kinerja anggaran pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2024 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan target yang terlalu tinggi atau alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya pada program indikator kinerja keluaran;
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) yang diukur belum optimal;
3. Kurang optimalnya dalam alokasi dan penggunaan anggaran, serta kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dapat mengurangi capaian kinerja secara keseluruhan; dan
4. Belum Efisien atau Efektifnya Penggunaan Anggaran;

Namun demikian, Realisasi IKU 13 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dapat dibandingkan dengan Tahun Renstra 2020-2024. Beberapa faktor

kendala atau hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan capaian kinerja IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan Kebijakan Anggaran;
2. Keterbatasan Sumber Daya;
3. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi Anggaran;
4. Resistensi terhadap Perubahan; dan
5. Perbedaan Sistem Informasi dan Teknologi;

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Perencanaan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 85,00% atau dalam kategori **Baik**. Adapun rincian nilai tersebut sebagai berikut:

1. Efektivitas sebesar 100

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran serta Pencapaian keluaran merupakan perbandingan antara pencapaian keluaran dengan target keluaran baik pada volume keluaran kegiatan dan indikator kinerja keluaran.

2. Efisiensi Penggunaan SBK sebesar 100

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran sesuai dengan SBK dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

3. Nilai Efisiensi SBK sebesar 0,00

Pengukuran nilai efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dan selisih antara pagu anggaran keluaran sesuai dengan SBK dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran yang termasuk bagian SBK.

Atas nilai EKA tersebut dan untuk perbaikan kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Memastikan pencapaian Rincian Output (RO) Tahun Anggaran berikutnya yaitu Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan sesuai komitmen; Memperhatikan capaian target Rincian Ouput yang masih dinilai rendah sebagai perbaikan tahun selanjutnya;
- b. Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK;

- c. Memperhatikan ketersedian sumber daya manusia, waktu, sarana prasarana dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan; Mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian dan menyusun rencana aksi penanganan;
- d. Melibatkan segenap pemangku kepentingan agar dapat memberikan masukan dalam peningkatan kinerja satker.

Pencapaian salah satu komponen pada IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran yaitu nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Pelaksanaan Anggaran sebesar 97,80% atau dalam kategori **Sangat Baik**. Rincian nilai sub komponen tersebut sebagai berikut.

- a. Revisi DIPA sebesar 100. Nilai ini menunjukkan pengajuan revisi DIPA dalam batas kewajaran.
- b. Deviasi halaman III DIPA sebesar 92,15. Deviasi dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan realisasi anggaran terhadap RPD. Deviasi halaman III DIPA BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2024 telah baik dengan rasio penyimpangan 7,85%.
- c. Penyerapan anggaran sebesar 98,91. Nilai ini menunjukkan penyerapan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan target ideal.
- d. Belanja Kontraktual sebesar 92. Nilai ini menunjukkan penyampaian data kontrak tepat waktu.
- e. Penyelesaian tagihan sebesar 100. Nilai ini menunjukkan penyelesaian tagihan dalam batas waktu yang ditentukan.
- f. Pengelolaan UP dan TUP sebesar 99,91. Nilai ini menunjukkan pengelolaan UP dan TUP yang optimal.
- g. Dispensasi SPM sebesar 0. Nilai ini menunjukkan penyampaian SPM dalam batas waktu yang ditentukan.
- h. Capaian output sebesar 100. Nilai ini menunjukkan output keseluruhan tercapai.
- i. LPJ Bendahara sebesar 100. Nilai ini menunjukkan penyampaian LPJ Bendahara yang tepat waktu.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkontribusi dalam upaya perbaikan atas nilai EKA Pelaksanaan Anggaran ini dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, mereviu kembali rencana kegiatan dan melakukan indentifikasi risiko-risiko yang menghambat pencapaian kinerja serta menyusun rencana aksi penanganan risiko dalam pelaksanaan anggaran.

- b. Aspek kepatuhan atas regulasi, meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak, pertanggungjawaban UP/TUP, penyampaian LPJ bendaraha, serta penyelesaian tagihan tepat waktu.
- c. Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan, meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM untuk menghindari retur SP2D, merealisasikan anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan triwulan dan memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Pegawai.
- d. Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran, ketepatan waktu dalam penyampaian perencanaan kas dan meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian oleh KPPN.
- e. Memantau capaian IKPA secara berkala melalui OM SPAN, agar dapat segera melaksanakan langkah-langkah strategis peningkatan aspek kinerja anggaran.
- f. Berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN mitra kerja setempat, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

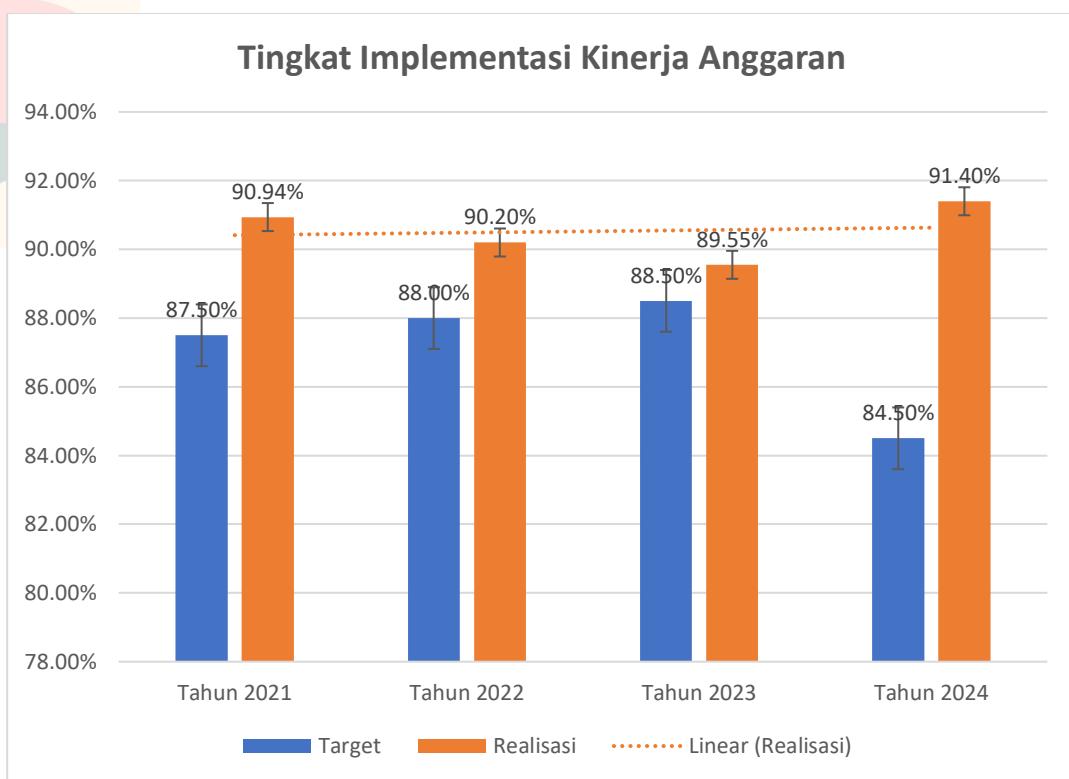
Berikut perbandingan realisasi IKU 13 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 Terhadap Target Jangka Menengah dalam Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	84,50%	91,40%	108,17

Berdasarkan tabel tersebut , pencapaian IKU sampai dengan Tahun 2024 telah memenuhi target Renstra. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Perbandingan capaian realisasi dan target pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran.



Gambar 16. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut realisasi pada IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran mengalami peningkatan dalam capaian realisasi pada empat tahun terakhir, tetapi tetap konsisten dalam melampaui target rencana strategis. Atas realisasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berupaya terus melakukan evaluasi terhadap manajemen kinerja anggaran serta melakukan upaya perbaikan atas setiap sub komponen pada Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menteri Keuangan menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran (*output*) Program dan efisiensi Keluaran (*output*) Kegiatan meliputi:

1. Data capaian Keluaran (*output*) Program;
2. Data capaian Keluaran (*output*) Kegiatan;

3. Pagu Anggaran; dan
4. Realisasi Anggaran.

Pengukuran efisiensi dihitung berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Triwulan IV Tahun 2024, nilai efisiensi atas kinerja anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9,09%. Nilai ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara masuk dalam kategori telah melakukan efisiensi terhadap pemakaian anggaran dalam rangka pencapaian keluaran.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi 6 - Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi pada hal ini yaitu dengan menggunakan media virtual *zoom meeting* pada saat pelaksanaan pembahasan Pemeriksaan Kinerja dan DTT pada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh beberapa entitas pemeriksaan (*auditee*).

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN yang optimal yaitu salah satu nya adalah penghapusan BMN yang tidak digunakan lagi untuk mengurangi biaya pemeliharaan, biaya perbaikan, serta biaya *maintenance* pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

c. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penggunaan Anggaran yang optimal akan mendukung kinerja suatu organisasi dengan baik. Efisiensi penggunaan anggaran yang tepat sasaran akan berdampak baik pada pengelolaan anggaran di masa yang akan datang. Efisiensi pada pengelolaan anggaran di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yaitu dengan memaksimalkan suatu rencana kegiatan dengan output lebih maksimal dengan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.

E. Perubahan Budaya Kerja

Budaya Kerja yang tertanam pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga sebagai moto untuk meningkatkan semangat kerja yaitu GENTAMU. Budaya Kerja GENTAMU selain diharapkan mampu menjaga integritas pegawai BPK Kaltara juga sebagai landasan kuat

pada program kegiatan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar ASN. Budaya Kerja BPK Kaltara GENTAMU adalah akronim dari Giat, Empati, Netral, Tegas, Assertif, Mandiri, dan Unggul. Budaya Kerja GENTAMU merupakan turunan dari perspektif nilai-nilai dasar ASN yaitu Berakhhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). Perubahan budaya kerja GENTAMU menjadi dasar bagi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat meningkatkan semangat kerja, meningkatkan inovasi, serta melakukan perbaikan atas setiap capaian kinerja.

Budaya kerja ini dibangun secara bersama-sama oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan pengusulan nama budaya kerja pada Agustus 2020. Budaya kerja ini termanifestasi dalam berbagai kegiatan sampai saat ini, yaitu:

1. Giat: bekerja sama atau kolaborasi dengan berbagai instansi baik vertikal maupun daerah dan BUMN misalnya untuk kegiatan kedinasan formal, sosial, kesehatan dan olahraga. Beberapa bentuk kegiatan tersebut diberikan nama yang mencerminkan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara misalnya, Masda, Kopi Hitam Kaltara, BPK Sehati, BPK Peduli Literasi, Forum Kehumasan, dll yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian berikutnya.
2. Empati: membantu rekan sejawat yang mengalami musibah maupun berbagi/donasi kepada warga masyarakat sekitar yang membutuhkan melalui program BPKawan Berbagi.
3. Netral dan Tegas: menerapkan sikap netral dalam melaksanakan tugas dengan tidak condong kepada salah satu pihak tertentu dan menolak ajakan yang dapat membawa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berpihak dalam aktivitas politik maupun kelompok masyarakat tertentu.
4. Asertif sebagai bentuk independensi: menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh BPK dalam melaksanakan tugas.
5. Mandiri: membuat inovasi dan kreasi baik dari sisi sarana dan prasarana maupun kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan menjadikan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dikenal oleh banyak kalangan lapisan masyarakat hingga di daerah-daerah terpencil. Inovasi-inovasi ini akan dibahas dalam bagian selanjutnya.
6. Unggul: Berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Membangun semangat untuk unggul dengan mengikuti perlombaan antar instansi atau menyelenggarakan lomba secara internal yang diikuti oleh pegawai BPK Perwakilan.

F. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 616 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Pada Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memperoleh pagu anggaran sebesar Rp18.894.486.000,00. Anggaran ini terbagi ke dalam anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sejumlah Rp6.714.489.000,00 dan anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sejumlah Rp12.179.997.000,00. Realisasi Anggaran pada Tahun 2024 terdapat blokir anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp105.113.000 Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 Perihal Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Nota Dinas Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 1398/ND/X/11/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Tindak Lanjut Kebijakan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Satker TA 2024.

Realisasi Anggaran pada RKP menunjukkan bahwa realisasi anggaran 99.85% dari pagu anggaran dan realisasi RKSP menunjukkan bahwa realisasi anggaran dengan persentase 99.84% dari pagu anggaran. Berikut tabel anggaran dan realisasi RKP dan RKSP pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

Tabel 35. Anggaran dan Realisasi RKP Tahun 2024

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	1043.FAF.U41	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	5.132.279.000	12 LHP	5.124.208.012	99.84%
	A.	<i>LHP Keuangan</i>	2.680.242.000	6 LHP	2.680.240.560	100.00%
	B.	<i>LHP Kinerja</i>	1.467.726.000	4 LHP	1.463.211.830	99.69%
	C.	<i>LHP DTT</i>	984.311.000	2 LHP	980.755.622	99.64%
2	1043.FAF.051	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	133.866.000	63 LHP	133.865.144	100.00%
3	1043.FAF.116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	98.064.000	12 Laporan	97.210.000	99.13%
4	1043.FAF.124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	146.608.000	12 Laporan	146.601.100	100.00%
5	1043.FAF.083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1.960.000	1 Rumusan	1.924.000	98.16%
6	1043.FAF.174	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	1.073.233.000	12 Laporan	1.072.360.489	99.92%

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	A.	<i>Melaksanakan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan</i>	7.460.000		7.090.000	95.04%
	B.	<i>Melaksanakan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan</i>	992.825.000		992.322.804	99.95%
	C.	<i>Melaksanakan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</i>	65.763.000		65.762.685	100.00%
	D.	<i>Melaksanakan Reviu atas Hasil Pemeriksaan</i>	7.185.000		7.185.000	100.00%
7	1043.FAF.091	Sumbangan IHPS Perwakilan	125.148.000	2 Laporan Sumbangan IHPS	125.147.243	100.00%
8	1043.FAF.099	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3.331.000	6 Laporan	3.266.730	98.07%
Jumlah (1 s.d. 8)			6.714.489.000	120	6.704.582.718	99.85%

Tabel 36. Anggaran dan Realisasi RKSP Tahun 2024

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	1043.FAF.175	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.882.506.000	21 Laporan	1.876.881.855	99.70%
	051.	<i>Melaksanakan Layanan Tata Usaha</i>	145.338.000		145.337.845	100.00%
	052.	<i>Melaksanakan Layanan Kehumasan</i>	310.492.000		308.456.083	99.34%
	053.	<i>Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia</i>	259.692.000		258.888.061	99.69%
	054.	<i>Melaksanakan Layanan Keuangan</i>	363.225.000		362.476.999	99.79%
	055.	<i>Melaksanakan Layanan Umum dan TI</i>	430.559.000		430.274.154	99.93%
	056.	<i>Melaksanakan Layanan Hukum</i>	214.840.000		213.894.375	99.56%
	057.	<i>Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK</i>	40.304.000		39.884.100	98.96%
	058.	<i>Melaksanakan Manajemen Internal Perwakilan</i>	118.056.000		117.670.238	99.67%
2	1043.EBA.994	Layanan Perkantoran	9.444.172.000	1 Layanan	9.436.709.299	99.92%

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	4.338.834.000		4.334.391.214	99.90%
	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.105.338.000		5.102.318.085	99.94%
	A.	<i>Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan</i>	755.782.000		754.628.116	99.85%
	B.	<i>Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan</i>	38.400.000		38.400.000	100.00%
	C.	<i>Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia</i>	197.612.000		197.517.594	99.95%
	D.	<i>Layanan Perkantoran Bidang Keuangan</i>	105.120.000		105.120.000	100.00%
	E.	<i>Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI</i>	3.742.182.000		3.741.377.194	99.98%
	F.	<i>Layanan Dukungan Keskretariatan Perwakilan</i>	266.242.000		265.275.181	99.64%
3	CI.1043.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	853.319.000	30 Paket	846.896.232	99.25%
	EBB.951.052	Layanan Sarana Internal	497.854.000	28 Unit	493.277.232	99.08%
	EBB.971.051	Layanan Prasarana Internal	355.465.000	2 Paket	353.619.000	99.48%
		Jumlah (1 s.d. 3)	12.179.997.000	52	12.160.487.386	99.84%

G. Inovasi

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya. Inovasi ialah sebagai sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa. Inovasi merupakan capaian penting pada suatu organisasi atau instansi pemerintah. Capaian Inovasi ada Tahun 2024 merupakan salah satu komponen pada realisasi IKU 10 tentang Tingkat Pemanfaatan Manajemen Pengetahuan. Inovasi yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Layanan Subbagian Hukum melalui Portal "Tanjik Hukum";
- Desain Label Barang Milik Negara Dengan Menggunakan QR Code dan Label Warna Sesuai Ruangan untuk Memudahkan Pendekripsi Informasi Barang Milik Negara (BMN);

3. Pengembangan Sistem Informasi BPK Provinsi Kalimantan Utara (SIBTARA), Pada tahap sekarang, SIBTARA telah mengintegrasikan lima Modul utama, yang masing- masing memiliki fungsionalitasnya, yaitu Modul SIPUSKA, Modul SIJAGO, Peminjaman BMN, Kerusakan BMN, Peminjaman Ruangan, dan Peminjaman Kendaraan. Integrasi ini memungkinkan berbagai fungsi tersebut berinteraksi secara terkoordinasi dalam satu platform SIBTARA. Melalui tahapan ini, diharapkan bahwa sistem dapat menyediakan lingkungan yang lebih terpadu dan efisien bagi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam pengelolaan berbagai layanan dan aset yang dimiliki;
4. Sistem Informasi SPJ *Go Online* (SIJAGO), aplikasi SIJAGO (Sistem SPJ *Go Online*) merupakan upaya peningkatan layanan keuangan dan kinerja melalui aplikasi SIJAGO;
5. SIPUSKA (Sistem Informasi Perpustakaan BPK Perwakilan Kaltara);
6. MASDA (Mengaji Bersama *Stakeholder* Daerah); dan
7. PROPAGANDA (Pemahaman Risiko Hukum Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah) pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

H. Penghargaan

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah mendapatkan beberapa penghargaan yang telah di peroleh. Raihan Penghargaan pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara tidak lepas dukungan setiap pegawai serta pihak manajemen yang terus menerus memberikan *support* kepada satuan kerja. Penghargaan yang dicapai oleh satuan kerja merupakan buah hasil kerja keras dari setiap elemen yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Penghargaan yang telah dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara diantaranya sebagai berikut:

1. Juara satu se-Nasional pada Instansi BPK RI dalam rangka Lomba Konten Video BPK Flash pada kategori Bidang Seni dan Kreativitas Rangkaian HUT BPK RI Ke-78;
2. Juara dua se-Nasional pada Instansi BPK RI dalam rangka Lomba *Big Data Analytics Challenge: Capture The Flag Competition Chapter III* pada kategori Kelembagaan Rangkaian HUT BPK RI Ke-78;
3. Juara satu Lomba Badminton dengan mengirimkan perwakilan *atlet* pada Tim Nasional AKN VI BPK pada kegiatan Rangkaian HUT BPK RI Ke-78; dan
4. Juara satu Lomba *Basketball* dengan mengirimkan perwakilan *atlet* pada Tim Nasional AKN VI BPK pada kegiatan Rangkaian HUT BPK RI Ke-78.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPK RI. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara kepada publik untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya. Laporan ini juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2024 memperoleh pencapaian skor kinerja sebesar **101,29**. Realisasi capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian 101,29 mengalami peningkatan sebesar 1,91 jika dibandingkan tahun 2023 dengan skor kinerja sebesar 99,38. Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian indikator kinerja, antara lain:

1. IKU 2 tentang Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
2. IKU 3 tentang Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
3. IKU 4 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
4. IKU 5 tentang Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan; dan
5. IKU 6 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
6. IKU 7 tentang Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
7. IKU 8 tentang Hasil Evaluasi AKIP;
8. IKU 10 tentang Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
9. IKU 11 tentang Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
10. IKU 12 tentang Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
11. IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran.

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target adalah IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, dan IKU 9 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut adalah Hasil Evaluasi Akurasi dan Konsistensi atas LHP yang dimuat dalam IHPS 1 Tahun 2024 pada Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penyusunan IHPS 1 Tahun 2024 oleh Direktorat EPP atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan nilai 93,33%. Bila dirinci lebih lanjut, perhitungan nilai tersebut disebabkan oleh penilaian tingkat konsistensi atas LHP yang mendapatkan nilai 83,33% dengan rincian konsistensi jumlah LHP sebanyak 1 dari 6 LHP dan terdapat 3 jumlah kasus pada konsistensi, serta kurangnya monitoring data pemanfaatan teknologi informasi pada Aplikasi *Big Data Analytics* BPK RI pada periode bulanan dan Triwulan Tahun 2024.

Dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebanyak delapan IKU telah melebihi target yang ditentukan, sebanyak tiga IKU telah sesuai dengan target dan dua IKU belum mencapai target pada Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian dari tahun ke tahun dengan menerapkan rencana aksi yang telah disusun. Untuk Indikator Kinerja yang belum mencapai target, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melakukan upaya-upaya perbaikan dengan memanfaatkan evaluasi Tahun ini untuk perbaikan pada periode Renstra yang selanjutnya.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja yang sudah sesuai dan yang telah melampaui target yang ditetapkan. Agar dapat meningkatkan pencapaian target kinerja yang belum tercapai, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada periode Renstra Tahun selanjutnya akan meningkatkan kualitas mutu hasil pemeriksaan, meningkatkan pengendalian mutu (*Quality Control*) dan pemerolehan keyakinan mutu (*Quality Assurance*) atas setiap Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan, memperbaiki tingkat konsistensi dan akurasi LHP yang diterbitkan, melaksanakan sosialisasi terkait teknologi informasi yang memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas penggunaan teknologi informasi dengan *Big Data Analytics* pada organisasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini semoga bermanfaat untuk perbaikan manajemen kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranan BPK RI dimasa yang akan datang.

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruben Artia Lumbantoruan, M.Si., Ak., CA., ACPA., CSFA., ERMAP., CDCP., CertDA., CFrA., CSCU., CertIA.

Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Laode Nusriadi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA., CFrA., ACPA., FCPA.

Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

ESELON I SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

ESELON II SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

SASARAN

Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2024

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,

Laode Nusriadi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA.,
CFrA., ACPA., FCPA.

Pihak Pertama,

Ruben Artia Lumbantoruan, M.Si., Ak.,
CA., ACPA., CSFA., ERMAP., CDCP.,
CertDA., CFrA., CSCU., CertIA.



PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA PEMILIK RISIKO BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pada Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan komitmen penerapan manajemen risiko yang meliputi penetapan konteks, profil dan peta risiko, serta penanganan risiko pada level Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pelaksanaan proses tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan manajemen risiko yang berlaku di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. Rencana aksi penanganan risiko dilaksanakan oleh seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, Saya berkomitmen melaksanakan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.

Jakarta, Januari 2024

Tortama KN VI,

Laode Nusriadi, S.E., M.Si., CA., Ak.,
CSFA., CFrA., ACPA., FCPA.

Kepala Perwakilan Provinsi

Kalimantan Utara,

Ruben Artia Lumbantoruan, M.Si., Ak.,
CA., ACPA., CSFA., ERMAP., CDCP.,
CertDA., CFrA., CSCU., CertIA.

Lampiran 3. Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Iku	Uraian	Target	Realisasi	Skor	Percentase Realisasi Dibanding Target (%)
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100.00%	96.00%	96.00	96.00%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75.00%	86.15%	105.00	115.00%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100.00%	100.51%	100.51	100.51%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100.00%	101.19%	101.19	101.19%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4.81	4.82	100.21	100.21%
8	Hasil Evaluasi AKIP	90.05	91.40	101.50	101.50%
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98.00%	97.89%	99.89	99.89%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100.00%	110.00%	105.00	110.00%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3.80	4.00	105.00	105.26%
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	84.50%	91.40%	105.00	108.17%
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024				101,29	

Lampiran 4. Alokasi Anggaran Pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Alokasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024		
Uraian Strategis Kinerja	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Strategi 1 - Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	6.079.703.000,00	6.714.489.000,00
Strategi 2 - Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	12.753.948.000,00	12.179.997.000,00
Jumlah Anggaran	18.833.651.000,00	18.894.486.000,00

Lampiran 5. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun Pelaporan Indikator Kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021, 2022 dan 2023, Tahun 2024

IKU	Uraian Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100.00%	88,57%	80,00%	78,00%	96,00%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100.00%	100%	100%	100,00%	100,00%
3	Percentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75.00%	86,08%	85,84%	80,32%	86,15%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100.00%	100,28%	101,03%	100,36%	100,51%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100.00%	100%	101%	100,00%	100,00%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100.00%	100,18%	100,46%	100,00%	101,19%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4.81	4,39	4,63	4,78	4.82
8	Hasil Evaluasi AKIP	90.05	89,58	89,82	87,10	91,40
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98.00%	99,59%	92,52%	97,16%	97,89%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100.00%	100%	100%	110,00%	110,00%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3.80	4,06	4,10	4,42	4.00
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100.00%	100%	100%	100,00%	100,00%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	84.50%	90,94%	90,20%	89,55%	91,40%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 (Setelah Revisi) : Rp 18.112.002.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp 17.942.850.358,00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 (Setelah Revisi) : Rp 18.894.486.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp 18.865.070.104,00

Lampiran 6. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Lima Tahun Sesuai Dengan Renstra 2020-2024 Pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2024	Percentase Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100.00%	96.00%	96.00%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75.00%	86.15%	115%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.51%	100.51%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100.00%	101.19%	101.19%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	4.81	4.82	100.21%

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2024	Percentase Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	87,00	88,00	89,00	90,05	91.40	101.50%
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	98.00%	97.89%	99.89%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100.00%	110.00%	110.00%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3.80	4.00	105.26%
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	84.50%	91.40%	108.17%

Lampiran 7. Anggaran Dan Realisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi

No	Nama Indikator Kinerja	Anggaran Sebelum Revisi (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi terhadap Anggaran Setelah Revisi (%)
1	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	6.079.703.000,00	6.714.489.000,00	6.704.582.718,00	99.85%
2	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	12.753.948.000,00	12.179.997.000,00	12.160.487.386,00	99.84%
Jumlah		18.833.651.000,00	18.894.486.000,00	18.865.070.104,00	99.84%

Lampiran 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahunan dan Realisasi Lima Tahun Terakhir

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi					Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=9/4)
1	• Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	83,33%	88,57%	80,00%	78,00%	96,00%	96,00%
2		IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3		IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	86,50%	86,08%	85,84%	80,32%	86,15%	115,00%
4		IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,70%	100,28%	101,03%	100,36%	100,51%	100,51%
5		IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100%	100,00%	101,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6		IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100%	100,18%	100,46%	100,00%	101,19%	101,19%
7		IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	4,69	4,39	4,63	4,78	4,82	100,21%
8		IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	90,05	88,59	89,58	89,82	87,10	91.40	101,50%
9		IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,00%	99,59%	99,59%	92,52%	97,16%	97,89%	99,89%

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi					Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
10		IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	100%	100,00%	100,00%	110,00%	110,00%	110,00%
11		IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,08	4,06	4,10	4,42	4,00	105,26%
12		IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13		IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%	92,60%	90,94%	90,20%	89,55%	91,40%	108,17%

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET

KINERJA TAHUN 2024

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun : 2024

A. Target Kinerja Utama

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, Dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	0%	40%	40%	100%	Desember 2024	Januari – Maret: <ul style="list-style-type: none">• Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I Tahun 2024 sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)• Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I Tahun 2024• Memastikan ketua tim, pengendali teknis, wakil penanggung jawab dan penanggung jawab pemeriksaan melakukan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> atas perencanaan pemeriksaan laporan keuangan

							<ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> atas perencanaan pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
							<p>April – Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan ketua tim, pengendali teknis, wakil penanggung jawab dan penanggung jawab pemeriksaan melakukan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> atas pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan laporan keuangan Menyusun laporan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> atas pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan laporan keuangan Memastikan LHP yang diterbitkan akurat dan konsisten Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas enam entitas
							<p>Juli – September:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan ketua tim, pengendali teknis, wakil penanggung jawab dan penanggung jawab pemeriksaan melakukan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> atas perencanaan pemeriksaan kinerja dan PDTT Menyusun laporan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> atas perencanaan pemeriksaan kinerja dan PDTT Menyampaikan LHP kepada Direktorat EPP Menyampaikan LHP kepada Itama
							<p>Oktober – Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan ketua tim, pengendali teknis, wakil penanggung jawab dan penanggung jawab pemeriksaan melakukan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> atas pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan kinerja dan PDTT Menyusun laporan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> atas pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan kinerja dan PDTT Memastikan LHP yang diterbitkan akurat dan konsisten Menyampaikan LHP kepada Dit. EPP Menyampaikan LHP kepada Itama
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0%	0%	0%	Desember 2024	<p>Januari – Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Kinerja dan DTT Tahun 2024 Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan TSAO <p>April – Juni:</p>

								<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2024 • Memastikan terdapat kesesuaian antara simpulan pemeriksaan dengan TSAO
								<p>Juli – September:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan TSAO
								<p>Oktober – Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan terdapat kesesuaian antara simpulan pemeriksaan dengan TSAO
IKU 3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember 2024	<p>Januari – Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL • Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL • Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS). • Melaksanakan persiapan mekanisme untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut di Triwulan II
								<p>April – Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan tindak lanjut sesuai dengan hasil percepatan penyelesaian tindak lanjut
								<p>Juli – September:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan mekanisme untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut di Triwulan IV
								<p>Oktober – Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan tindak lanjut sesuai dengan hasil percepatan penyelesaian tindak lanjut
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2024	<p>Januari – Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional • Melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP
								<p>April – Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP
								<p>Juli – September:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP
								<p>Oktober – Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP • Menyusun laporan atas Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP

IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember 2024	Januari – Maret:
								<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan persiapan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan • Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan
								April – Juni:
								<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan persiapan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan • Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2024	Juli – September:
								<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan
								Oktober – Desember:
								<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan • Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan • Menyampaikan Surat Keluar LHP kepada pihak terkait
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)	-	-	-	Sangat Memuaskan (4,81)	Desember 2024	Januari – Maret:
								<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan secara berkala terkait implementasi nilai dasar BPK • Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap
								April – Juni:
								<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan secara berkala terkait implementasi nilai dasar BPK • Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap
IKU 8	Kesiapan Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	July – September:
								<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal • Melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Tematik Lokal sesuai dengan RKP
								Oktober – Desember:
								<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal sesuai dengan RKP • Menyusun laporan atas Pemeriksaan Tematik Lokal sesuai dengan RKP

								<p>pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP • Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja
							<p>April – Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan secara berkala terkait implementasi nilai dasar BPK 	
							<p>Juli – September:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan secara berkala terkait implementasi nilai dasar BPK 	
							<p>Oktober – Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan secara berkala terkait implementasi nilai dasar BPK • Mengarahkan kepada seluruh peagwai untuk melaksanakan survei/evaluasi atas Implementasi Nilai Dasar BPK 	
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)	-	-	-	AA (90,05)	Desember 2024	<p>Januari – Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam rangka penilaian evaluasi AKIP • Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2024 • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku
								<p>April – Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rangka evaluasi AKIP kepada Itama • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi
								<p>Juli – September:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan Itama terkait hasil Evaluasi AKIP
								<p>Oktober – Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi terhadap nilai dan hasil Evaluasi AKIP
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	28%	40%	70%	98%	Desember 2024	<p>Januari – Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan Layanan Dasar (JASMIN), • Memanfaatkan layanan aplikasi umum (SISDM),

								<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan layanan pemeriksaan (SMP, SiAP, <i>Big Data Analytic</i>, dan SIPTL) • Memanfaatkan aplikasi manajemen pengetahuan Dalam rangka menunjang pekerjaan seluruh pegawai di Lingkungan BPK Pwk Kaltara
							<p>April – Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan Layanan Dasar (JASMIN) • Memanfaatkan layanan aplikasi umum (SISDM), • Memanfaatkan layanan pemeriksaan (SMP, SiAP, <i>Big Data Analytic</i>, dan SIPTL) • Memanfaatkan aplikasi manajemen pengetahuan Dalam rangka menunjang pekerjaan seluruh pegawai di Lingkungan BPK Pwk Kaltara 	
							<p>Juli – September:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan Layanan Dasar (JASMIN) • Memanfaatkan layanan aplikasi umum (SISDM), • Memanfaatkan layanan pemeriksaan (SMP, SiAP, <i>Big Data Analytic</i>, dan SIPTL) • Memanfaatkan aplikasi manajemen pengetahuan Dalam rangka menunjang pekerjaan seluruh pegawai di Lingkungan BPK Pwk Kaltara 	
							<p>Oktober – Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan Layanan Dasar (JASMIN) • Memanfaatkan layanan aplikasi umum (SISDM), • Memanfaatkan layanan pemeriksaan (SMP, SiAP, <i>Big Data Analytic</i>, dan SIPTL) • Memanfaatkan aplikasi manajemen pengetahuan Dalam rangka menunjang pekerjaan seluruh pegawai di Lingkungan BPK Pwk Kaltara 	
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	37,50%	50%	100%	Desember 2024	<p>Januari – Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan LKPD • Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan • Menyusun perencanaan <i>best practice</i> yang akan dilakukan • Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan • Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2023
								<p>April – Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan KTF dan <i>Sharing Session</i> • <i>Blogging</i> • <i>Kick off</i> pelaksanaan best practice yang telah direncanakan • Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan best practice yang yang direplikasi
								<p>Juli – September:</p>

								<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan <i>Inhouse training</i> • <i>Blogging</i> • Reviu dan Pemantapan <i>best practice</i> yang telah dilaksanakan • Melaksanakan <i>best practice</i> yang akan direplikasi
								<p>Oktober – Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan KTF dan <i>Sharing Session</i> • <i>Blogging</i> • Membuat laporan <i>best practice</i> yang sudah dilaksanakan • Menyampaikan laporan <i>best practice</i> yang telah dilaksanakan ke Dit. PSMK • Membuat laporan pelaksanaan replikasi <i>best practice</i> • Menyampaikan laporan replikasi <i>best practice</i> yang telah dilaksanakan ke Dit. PSMK • Membuat laporan terkait pelaksanaan pada aktivitas manajemen pengetahuan • Menyampaikan laporan aktivitas manajemen pengetahuan yang telah dilaksanakan
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember 2024	<p>Januari – Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan komunikasi dengan pemangku kepentingan secara berkala • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit • Melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan secara berkala
								<p>April – Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan komunikasi kepada pemangku kepentingan secara berkala • Melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan secara berkala
								<p>Juli – September:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan komunikasi kepada pemangku kepentingan secara berkala • Melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan secara berkala
								<p>Oktober – Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan komunikasi kepada pemangku kepentingan secara berkala

															<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi jadwal pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN • Mengusulkan pegawai yang akan mengikuti diklat pada TW IV yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	84,50%	84,50%	84,50%	84,50%	Desember 2024	Januari – Maret:	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2024 dan Kebijakan TA. 2024 • Menyusun Dokumen Penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran • Menyusun data capaian output. • Memastikan realisasi anggaran setiap bulannya disesuaikan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan 	April – Juni:	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan monitoring evaluasi terhadap nilai capaian Output, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran pada IKPA • Memastikan sub komponen EPA dan EKA tercapai • Memastikan realisasi anggaran setiap bulannya disesuaikan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan 	Juli – September:	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan monitoring evaluasi terhadap nilai capaian Output, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran pada IKPA • Memastikan realisasi anggaran setiap bulannya disesuaikan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan 	Oktober – Desember:	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan monitoring evaluasi terhadap nilai capaian Output, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran pada IKPA • Memastikan realisasi anggaran setiap bulannya disesuaikan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan



2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Jalan Mulawarman No.98 Tarakan 77111
Telepon (0551) 33939